

TPKA

Tim Peningkatan Kinerja Arkeologi



**Pusat Arkeologi Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

TPKA

TIM PENINGKATAN KINERJA ARKEOLOGI



**Pusat Arkeologi Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

KATA PENGANTAR

Pembentukan TPKA telah melalui proses diskusi yang panjang. Berawal dari munculnya keprihatinan akan berbagai hambatan yang dihadapi Pusat Arkeologi Nasional dan kesepuluh UPT (Balai Arkeologi) dalam menjalankan misinya, hingga kesadaran untuk melakukan upaya-upaya untuk memperbaikinya. Diskusi diawali di lingkup pimpinan dan koordinator untuk melihat secara transparan faktor-faktor penghambat kemajuan lembaga. Dari diskusi terdapat 8 hambatan yang paling menonjol, sehingga diputuskan membentuk 8 TPKA. Dirasakan pula perlunya pembentukan TPKA di masing-masing Balai Arkeologi sebagai penghubung dan partner TPKA Pusat, sekaligus motor penggerak pengimplementasian kegiatan di Balai Arkeologi. Rentetan diskusi berlanjut pada penyusunan konsep dan program kerja yang kemudian difinalkan pada *workshop* yang dihadiri kepala-kepala Balai dan koordinator peneliti, hingga menghasilkan konsep yang lebih lengkap seperti yang dituangkan dalam buku ini.

Pembentukan TPKA ini berlangsung pada waktu yang tepat dimana Pusat Arkeologi Nasional dipimpin oleh pejabat yang baru (Drs. I Made Geria M.Sc.) dengan semangat dan pengharapan yang baru. Pembentukannya juga bertepatan dengan pemerintahan yang baru dimana salah satu visi perubahan (Trisakti) adalah menuju Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Pentingnya budaya yang berkepribadian itu ditegaskan pula pada salah satu dari sembilan program prioritas (Nawa Cita) pemerintah, yakni melakukan revolusi karakter bangsa. TPKA dimaksudkan untuk merespons visi itu dengan mengoptimalkan kontribusi arkeologi bagi kehidupan bangsa, khususnya bagi penguatan jati diri.

Buku ini merupakan acuan dasar bagi TPKA dalam menjalankan misinya, membantu para pimpinan dalam mengidentifikasi, mengeksplorasi, mendiskusikan, dan mencari solusi dalam menangani hambatan-hambatan kemajuan, hingga menjadi motor penggerak bagi kemajuan lembaga dan arkeologi Indonesia. Buku ini akan senantiasa dimutakhirkan sejalan dengan dinamika kelembagaan dan kemajuan arkeologi, termasuk ide-ide yang berkembang dalam diskusi-diskusi TPKA. Harapan kita dengan keberadaan buku acuan ini, didukung oleh kesadaran untuk melakukan perubahan dari tim-tim TPKA serta semua SDM keluarga besar Pusat Arkeologi Nasional, hambatan-hambatan dapat diatasi dan lembaga ini mampu menjawab tantangan sebagai lembaga yang mengemuka dalam memajukan arkeologi Indonesia, memberikan kontribusi penting bagi pembangunan peradaban yang berkeindonesiaan.

Jakarta, 25 November 2014

TPKA: Gerakan Menuju Perubahan

Sambutan Kepala Pusat Arkeologi Nasional

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan hasil kerja keras semua pihak, Tim Peningkatan Kinerja Arkeologi Nasional (TPKA) terbentuk secara aklamasi dan disepakati bersama oleh Pusat Arkeologi Nasional (Pusarnas) dan 10 Balai Arkeologi se-Indonesia. TPKA merupakan media silaturahmi Pusarnas dan Balai-balai Arkeologi seluruh Indonesia. TPKA merupakan media harmonisasi kebijakan dan media evaluasi kinerja yang kita lakukan bersama. Pembentukan TPKA sebagai upaya peningkatan SDM dalam penguatan hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri maupun kerjasama dengan daerah. TPKA juga diharapkan dapat menguatkan peran Pusarnas dan jajarannya secara akademis dan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap peradaban bangsa dan penguatan karakter sejalan dengan program pemerintahan baru dalam program prioritas Nawa Cita yakni revolusi mental dan merajut tenun kebangsaan dalam kebinekaan.

Pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah sejalan dengan tugas dan fungsi arkenas mengadakan penelitian, merekomendasi untuk pelestarian yang sudah dilaksanakan dengan instansi terkait. Pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian melalui TPKA dibentuk melalui Rumah Peradaban yang merupakan media untuk menjembatani antara masyarakat dan instansi arkeologi khususnya Pusarnas dan Balai-balai agar hasil-hasil penelitian oleh Pusarnas dan Balai-balai lebih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kami mempunyai keyakinan upaya yang kita lakukan bersama ini akan memberikan hasil yang baik, karena didasari oleh ini keinginan bersama untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk kepentingan bersama. Upaya ini tidak bisa dilalukan tanpa sinergi antara Pusarnas dan mitra kerja 10 Balai Arkeologi Indonesia. Selaku Kepala Pusat Arkeologi Nasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Ris. Dr. Harry Truman Simanjuntak selaku koordinator TPKA yang telah bekerja keras demi terbentuknya TPKA ini. Kami juga berterima kasih kepada ketua dan anggota 8 TPKA yang memiliki komitmen bersama dalam memajukan Arkeologi. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Tim TPKA Balai Arkeologi yang secara intens berdiskusi untuk merumuskan formula yang tepat dapat dijadikan acuan lembaga dalam menjalankan fungsinya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran dan tenaganya demi kemajuan lembaga kita. Akhir kata semoga melalui TPKA ini, kita bersama-sama dapat mewujudkan lembaga Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi yang kredible, bermutu, disegani di dalam maupun luar negeri serta yang paling penting adalah bermanfaat untuk masyarakat luas.

TPKA: Gerakan Menuju Perubahan

DAFTAR ISI

Pengantar

Sambutan Kepala Pusat Arkeologi Nasional

Daftar Isi

BAB I	TPKA: GERAKAN MENUJU PERUBAHAN	1
BAB II	KONSEP DAN PROGRAM KERJA TPKA	17
	1. TPKA PEMUTAKHIRAN DAN PEMASYARAKATAN BUKU INDUK	19
	2. TPKA RUMAH PERADABAN.....	23
	3. TPKA PENELITIAN ARKEOLOGI: ISU KEBINEKAAN	29
	4. TBKA: AKREDITASI	37
	5. TPKA LAPORAN PENELITIAN	45
	6. TPKA LABORATORIUM	53
	7. TPKA BIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI	67
	8. TPKA STANDARDISASI UPT	73
BAB III	PENUTUP	81
LAMPIRAN	83
	1. Notulensi <i>Workshop</i>	85
	2. Susunan TPKA Pusat	109
	3. Susunan TPKA Balai Arkeologi	111

TPKA: Gerakan Menuju Perubahan

BAB I

TPKA: GERAKAN MENUJU PERUBAHAN

Nothing great was ever achieved without enthusiasm
(R. W. Emerson)

Kesenjangan Idealisme dan Realita

Perkembangan arkeologi (dan ilmu terkait) dan kemajuan zaman menawarkan tantangan bagi Pusat Arkeologi Nasional (selanjutnya disebut Pusat) dan kesepuluh UPT Balai Arkeologi (selanjutnya disebut Balai) untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsinya. Lembaga dengan fungsinya yang sangat strategis - menjadikan masa lampau bermanfaat bagi masa kini dan masa datang - harus tetap *perform* jika tidak ingin terpinggirkan. Konsekwensinya lembaga ini tidak boleh diam, apalagi puas dengan keberadaannya yang sekarang, tetapi harus terus bergerak menuju lembaga yang mengemuka di lingkup nasional dan internasional didukung SDM yang mumpuni. Lebih jauh lagi, lembaga yang fungsi utamanya melakukan penelitian arkeologi ini - segmen hulu pengelolaan warisan budaya - harus menjadi barometer kemajuan arkeologi di Indonesia. Inilah idealisme, sekaligus tantangan untuk pencapaiannya, sebuah panggilan mulia yang melandasi pentingnya keberadaan lembaga penelitian arkeologi bagi sebuah bangsa. Atas dasar fungsinya yang strategis itu, lembaga penelitian arkeologi tetap eksis dan hingga kini telah mencapai usia lebih seabad (OD 1913).

1. Pusat Arkeologi Nasional dengan fungsinya yang sangat strategis - menjadikan masa lampau bermanfaat bagi masa kini dan masa datang - harus tetap *perform* jika tidak ingin terpinggirkan.



2. Idealisme: lembaga penelitian yang mengemuka di lingkup nasional dan internasional didukung SDM yang mumpuni. Dalam realita lembaga ini seolah tak berdaya merespons tantangan kemajuan.



3. Sumbangan pikiran terhadap pemecahan isu-isu kebangsaan jarang menggema, bahkan kontribusi arkeologi Indonesia untuk dunia pun sangat minim.

Kita sekarang memasuki abad ke-2 meneruskan tradisi penelitian arkeologi yang melembaga itu. Jika melihat perjalanan panjangnya terbayang kondisi kelembagaan yang sudah mapan dalam pencapaian visinya. Setidaknya tergambar di benak kita lembaga yang mengemuka di lingkup nasional dan internasional; lembaga yang sudah menemukan bentuk idealnya, sebagai pengembangan lanjut dari periode "keemasan" di tahun 80-an ketika dipimpin oleh alm. Prof. Dr. R.P. Soejono. Kenyataan tidak demikian, kondisi sekarang justru semakin jauh dari pencapaian visi itu. Lembaga ini seolah tak berdaya merespons tantangan kemajuan. Lihat saja di lingkup internal, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan tidak berjalan optimal. Penelitian sebagai misi utama kelembagaan berjalan kurang greget tanpa obsesi yang kuat dari peneliti dan pimpinan hingga penemuan-penemuan besar jauh dari jangkauan. Konsekwensinya pandangan-pandangan baru tentang kehidupan masa lampau pun menjadi barang langka.

Penelitian sebagai kegiatan hulu yang tersendat berdampak pula pada kegiatan hilir. Pemasarakatan hasil-hasilnya pun menjadi terbatas dan tidak pula menggema. Dampak lebih jauh dari kondisi ini, sumbangan pemikiran terhadap pemecahan isu-isu kebangsaan pun jarang terdengar, bahkan kontribusi arkeologi Indonesia untuk dunia pun sangat minim. Kenyataan ini sangat kontradiktif dengan potensi besar arkeologi kita. Sejarah yang sangat panjang dengan kehidupan yang dinamis mestinya sarat dengan tinggalan dan nilai yang memberi banyak manfaat bagi kehidupan sekarang. Ribuan situs menyimpan kekayaan budaya material leluhur beserta nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsiknya, tetapi sebagian besar tetap dalam kesunyian dan kediaman oleh keterbatasan penelitian.

Masih di lingkup internal, yang kita jumpai sekarang adalah semakin menghilangnya semangat kebersamaan dan sinergi di lingkup Pusat dan Balai. Masing-masing unit kerja atau pribadi cenderung berjalan sendiri tanpa kerinduan untuk saling mengisi kekurangan. Koordinasi dan kerjasama menjadi barang mahal yang sukar ditemukan, jika tidak dikatakan sebatas retorika. Lebih dari itu Pusat seolah melupakan fungsinya membina Balai agar semakin maju. Balai pun serasa terlena hingga prinsip bertindak lokal untuk kontribusi regional dan nasional cenderung terabaikan. Kerja sama antar-Balai dalam memecahkan masalah-masalah arkeologi regional pun tak kunjung tercipta. “Balaimu, Balai kita; Pusatmu, Pusat kita” belum tertanam dalam *mindset* kita.

Di lingkup eksternal juga setali tiga uang. Pentingnya penelitian arkeologi bagi kehidupan bangsa masih kurang disadari masyarakat. Sebabnya, karena hasil-hasil penelitian yang masih terbatas tadi. Sudah terbatas kurang pula mengemuka bagi pencerdasan, penumbuhan kebanggaan dan semangat nasionalisme, penguatan jati diri, apalagi memajukan ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, para penentu kebijakan pun belum menyadari arti pentingnya penelitian arkeologi, sehingga support manajerial dan finansial yang memutar dan melancarkan roda penelitian (dan kegiatan lain) masih jauh dari harapan. Berbagai pihak seolah lupa akan pentingnya hasil penelitian untuk memberikan kontribusi mendasar bagi pengembangan budaya dan peradaban yang berkeindonesiaan. Entah karena kurangnya kesadaran pihak penentu kebijakan atau karena kurangnya daya juang internal, *grade* peneliti di lingkup Pusat dan Balai pun dipeloroatkan beberapa tingkat di bawah standar nasional, padahal SK peneliti di lingkup pusat dan balai dikeluarkan oleh LIPI, lembaga negara yang berwenang untuk itu.

4. Indikator kemajuan: Maraknya penemuan-penemuan besar yang menghasilkan pandangan-pandangan baru kearkeologian.



5. Berbagai pihak belum menyadari arti pentingnya penelitian arkeologi bagi pembangunan peradaban yang berkeindonesiaan.

6. Tali-temali hambatan internal dan eksternal menjadikan Pusat Arkeologi Nasional dan 10 UPTnya masih jauh dari idealisme dan pencapaian visi.



7. Mendasari semua keterbatasan itu, pendanaan yang jauh dari memadai telah membatasi gerak langkah dan kinerja.

Masih di lingkup eksternal, pengkaderan berlapis para peneliti muda yang seharusnya berlangsung berkesinambungan selama ini terhambat oleh kebijakan "zero growth" pemerintah. Diakui kadang kala ada rekrutmen calon peneliti baru, namun sifatnya yang sporadis dan okasional di Pusat atau Balai tetap saja menyulitkan pengkaderan berlapis itu. Dapat ditambahkan pula bahwa kelembagaan yang sering berpindah posisi seiring perubahan nomenklatur kementerian cukup menguras pikiran dan tenaga untuk penyesuaian visi dan misi. Mendasari semua keterbatasan itu, pendanaan yang jauh dari memadai telah membatasi gerak langkah dan kinerja. Penelitian multi- dan lintas-disiplin dengan waktu pelaksanaan yang cukup bagi perolehan data lapangan terkendala. Bayangkan ada ekskavasi sistematis yang hanya berlangsung 10-12 hari: bukankah itu hanya proforma yang justru merusak situs dan menghilangkan data?

Itulah fakta. Tali-temali kendala internal dan eksternal menjadikan Pusat dan Balai masih jauh dari capaian visinya, bahkan semakin menjauhinya. Kedua faktor saling bergayut hingga semakin menciptakan benang kusut keterpurukan yang sulit diurai. Kita boleh saja menganggap keterpurukan oleh kurangnya dukungan penentu kebijakan, namun kita pun harus introspeksi akan kekurangan dan kelemahan kita. Kepuasan akan kondisi yang ada dan lemahnya tekad dan semangat kerja, serta lemahnya daya juang di level pimpinan boleh jadi penyebab dasar, hingga para penentu kebijakan pun kurang memberi – apalagi menawarkan - ruang gerak yang luas bagi kemajuan arkeologi.

Sifat-sifat di atas jelas penghambat kemajuan, sehingga tidak harus dibiarkan berlarut, karena akan semakin membawa kita pada keterpurukan yang dalam. Mari para peneliti dan pimpinan: jangan berdiri saja di persimpangan jalan, kita perbaiki

keadaan ini dengan melakukan sesuatu. Tekad harus kita canangkan - keluar dari keterpurukan untuk meraih kemajuan. Untuk itu siapkan **respons konseptual** untuk bangkit kembali menuju lembaga riset arkeologi yang mengemuka.

Bagaimana Konsepnya?

Diulangi, "Keluar dari keterpurukan untuk meraih kemajuan": Itulah titik berangkat kita. Untuk itu siapkan konsep dan implementasikan. Pembinaan harus dari dalam dan oleh kita sendiri. Kemunduran timbul karena faktor internal, sehingga perbaikan harus dari dalam pula. Premis pertama, jika faktor-faktor internal dapat kita benahi maka faktor eksternal akan mengikutinya. Untuk itu sasaran utama adalah pemberdayaan potensi SDM yang kita miliki, karena di tangan merekalah semua bisa terjadi. SDM dapat menjadi momok kemajuan, tetapi dapat pula menjadi agen perubahan. Bagaimana menjadikan mereka agen perubahan, setidaknya lewat tiga kata kunci: pola pikir (*mindset*), pemberdayaan (*empowerment*), dan semangat kebersamaan (*l'esprit du corp*). Merubah pola pikir (cara memandang dan menghadapi tantangan kemajuan) berarti merubah: (1) sifat individualisme menjadi kolektivisme; (2) sifat instanisme (mendapatkan sesuatu tanpa upaya yang memadai) menjadi kerja keras, memikirkan kondisi kelembagaan, dan berdiskusi informal/formal; (3) skeptisisme kelembagaan berubah menjadi *concern* kelembagaan, (4) meneliti *as usual* menjadi konseptual dan bertanggung jawab, dan (5) egoisme pribadi atau sektoral menjadi altruisme. Pemberdayaan artinya menggali dan memanfaatkan potensi-potensi, menginspirasi kreativitas, dan bekerja kolejal. Sementara kebersamaan dimaksudkan untuk membangun semangat kolektivisme dan solidisme dalam menjalankan misi dan mencapai visi.

8. Pimpinan dan peneliti terampil membenahi keterpurukan. Langkah awal harus dimulai dari dalam dengan menyiapkan respons konseptual untuk bangkit menuju lembaga riset yang mengemuka.



9. Premis pertama: jika hambatan internal dapat kita benahi maka hambatan eksternal akan mengikuti. Kebersamaan.

10. Tiga kata kunci perubahan: *mindset*, *empowerment*, dan *kebersamaan*.



11. kemampuan manajerial, pemahaman kisi-kisi penelitian, dan kemauan berbuat terbaik yang dimiliki setiap pimpinan akan membuka jalan yang lebar bagi akselerasi kemajuan.

Pencapaian ketiga kondisi membutuhkan instrument, yaitu pembinaan dan diskusi. "Tingkatkan pembinaan di setiap lini dan lakukan diskusi berkesinambungan". Mengingat perubahan melalui proses, maka pembinaan dan diskusi harus berkesinambungan. Pembinaan pimpinan terhadap yang dipimpin serta senior terhadap junior akan merevitalisasi talenta-talenta yang tersembunyi hingga menciptakan kader-kader yang mumpuni dan memiliki integritas. Di sinilah letak peran para pimpinan dan senior yang sangat strategis untuk keberhasilannya. Dalam kaitan ini kemampuan manajerial, pemahaman kisi-kisi penelitian, dan kemauan berbuat terbaik yang dimiliki setiap pimpinan akan membuka jalan yang lebar bagi akselerasi kemajuan. Memiliki prasyarat ini, lembaga tidak akan *auto pilot*, dalam arti semua berjalan sendiri-sendiri tanpa kontrol dan arahan. Dengan kemampuan itu pula pimpinan tidak berpikir sektoral, tetapi kolegal sehingga dapat menjual ide-ide orisinal dalam memperjuangkan peran penting lembaga bagi kemajuan arkeologi. Tambahan lagi, memiliki sifat dan pemikiran seperti ini akan menjadikan pimpinan berperan sebagai inisiator dan pengarah kegiatan dalam menyelaraskan kemajuan bersama.

Jika pembinaan bersifat *top-down*, diskusi sifatnya *top-down* tetapi juga *bottom-up*. Diskusi membuka ruang komunikasi untuk berbagi ide dan menciptakan saling pengertian dan semangat kolegal, menerima perbedaan pendapat, menemukan dan merumuskan solusi pemecahan masalah, dan pengembangan kegiatan. Melalui diskusi pula kita diingatkan akan pentingnya soliditas dan keselarasan kegiatan di Pusat dan Balai, sekaligus mengajak semua SDM untuk berbuat yang terbaik bagi arkeologi dan lembaga. Kekuatan diskusi merubah pola pikir dan sikap mendorong perlunya ditradisikan berkesinambungan, secara formal dan informal atau secara

terbatas ataupun lengkap. Perubahan inilah yang disebut Revolusi Mental - salah satu program prioritas presiden Jokowi - yang merevitalisasi semua potensi untuk peningkatan kinerja melalui gerakan dari dalam pribadi lepas pribadi. Tentu harus diingat, kinerja yang dimaksud disini bukan yang sifatnya individual atau sektoral, melainkan kinerja yang sistemik melalui sinergi kebersamaan hingga menciptakan integritas tekad dan kemajuan yang selaras di Pusat dan Balai.

TPKA

Dari tataran *mindset* di atas kita bergerak ke konkretisasi, yakni mengoperasionalkan konsepsi itu. Untuk itu perlu ada motor penggerak khusus di luar motor-motor yang sudah ada (pimpinan dan peneliti umumnya). Premis kedua, tanpa motor penggerak khusus kondisi kelembagaan dan arkeologi akan tetap begitu-begitu saja jika tidak lebih buruk. Oleh sebab itu kita membutuhkannya untuk menambah kecepatan. Motor penggerak itu adalah kelompok-kelompok kerja yang kita sebut Tim Peningkatan Kinerja. Bekerja untuk *problematic solving* tim-tim inilah nantinya yang menjadi dinamisor kegiatan di Pusat dan di Balai di bawah koordinasi para pimpinan. Berdasarkan penelaahan setidaknya terdapat “simpul-simpul kemacetan” yang menghambat kemajuan baik di bidang perangkat keras (prasarana dan sarana) dan perangkat lunak kelembagaan (sistem dan ketentuan-ketentuan kerja), maupun – lebih menonjol – di bidang SDM. Semua simpul itu mendesak untuk diurai dan untuk itulah TPKA hadir untuk menciptakan sinergi kebersamaan di Pusat dan di Balai.

Lebih konkritnya, TPKA bertujuan meningkatkan kinerja melalui pembenahan aspek konseptual, manajerial, dan operasional di lingkungan Pusat dan kesepuluh

- 12. Instrumen ampuh perubahan:
Pembinaan di setiap lini dan
diskusi berkesinambungan.**



- 13. TPKA respons konseptual,
manajerial, dan operasional untuk
bangkit kembali menuju lembaga
riset yang mengemuka.**

14. Premis-2: Tanpa motor-motor penggerak kondisi kelembagaan dan penelitian arkeologi akan begitu-begitu saja, jika tidak semakin buruk.



15. TPKA menempati posisi strategis untuk membantu para pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga.

Balai. Keberadaan tim-tim ini diharapkan memberikan efek ganda yang selain memberdayakan sumberdaya ketenagaan sesuai minat, kompetensi, dan kapabilitasnya, bersama para pimpinan membangun semangat kebersamaan menghadapi berbagai tantangan kelembagaan dan keilmuan.

Dari uraian di atas jelas bahwa TPKA menempati posisi strategis untuk membantu para pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. Tegasnya TPKA bersama pimpinan membangun interaksi & interkoneksi di lingkup lembaga, antara Pusat dan Balai dan antar-Balai. Oleh sebab itu pula semua kegiatan TPKA harus bersama pimpinan. Di Pusat kegiatan TPKA harus sejjin dan dukungan pimpinan, sementara kegiatan TPKA di daerah harus melibatkan pimpinan Balai. Perlu disadari bahwa tidak semua dapat diselesaikan TPKA. Sekali lagi, TPKA secara khusus menangani masalah-masalah yang paling *urgent* sebagai penghambat kemajuan, sementara tugas-tugas lainnya tetap ditangani unit-unit kerja terkait. TPKA sendiri akan dievaluasi secara berkala sehingga kinerja dapat senantiasa ditingkatkan. Keberadaan TPKA sifatnya dinamis. TPKA memungkinkan dikembangkan jika ternyata ada hambatan lain yang *urgent* untuk diatasi dan jika dibiarkan akan mengakibatkan keterpurukan. TPKA juga akan diakhiri jika hambatan di lingkup tugasnya telah teratasi.

TPKA Pusat

Berdasarkan simpul-simpul kemacetan yang diuraikan di atas, maka dibentuk delapan TPKA Pusat. Masing-masing dipimpin seorang ketua dengan dua atau lebih anggota sesuai kebutuhan atau lingkup kerja. Ke-8 TPKA tersebut adalah:

1. TPKA Rancangan Induk: memutakhirkan Rancangan Induk sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan

2. TPKA Rumah Peradaban: Menginisiasi dan menyiapkan rancangan pembangunan Rumah Peradaban sebagai sarana pemasyarakatan, edukasi, dan pengembangan penelitian
3. TPKA Penelitian Kebinekaan: mengarahkan penelitian yang terintegrasi antara Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi tentang kebinekaan sebagai sebuah kontribusi pemikiran tentang isu aktual kebangsaan
4. TPKA Laboratorium: menginisiasi dan mengkaji pengembangan laboratorium yang *appropriate* di Pusat Arkeologi Nasional dan kesepuluh Balai Arkeologi untuk memfasilitasi kepentingan penelitian
5. TPKA Laporan Penelitian: membimbing dan mengarahkan penulisan laporan yang sesuai dengan kaidah ilmiah sebagai pertanggungjawaban penelitian
6. TPKA Akreditasi Majalah: mengarahkan dan membantu Balai-balai Arkeologi memiliki majalah terakreditasi LIPI serta mempertahankan (*maintenance*) majalah yang sudah terakreditasi.
7. TPKA EHPA: menjadikan evaluasi tahunan lebih terstruktur dan terkonsepsi sesuai dengan kebijakan dengan rekomendasi penyempurnaan yang terimplementasikan
8. TPKA Standardisasi UPT: meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan Balai Arkeologi dalam mengembangkan arkeologi kewilayahan dan memberi kontribusi bagi pengembangan arkeologi nasional.

Patut dijelaskan bahwa kedelapan TPKA ini saling mengkait dalam arti kegiatan masing-masing TPKA saling mengisi satu sama lain. Sebagai motor penggerak ke arah kemajuan arkeologi, TPKA dituntut bekerja sinergis dengan TPKA lain. Kondisi ini mendorong perlunya diskusi-diskusi baik di internal TPKA maupun antar-

16. TPKA dibentuk sebagai *problem solving*, menggerakkan potensi atau kekuatan yang dimiliki Pusat dan Balai untuk bersama-sama mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.



17. Keseluruhan TPKA saling mengkait dalam arti kegiatan masing-masing saling mengisi satu sama lain.

18. TPKA Pusat tidak sendirian dan lingkup kerjanya tidak sebatas Pusat Arkeologi Nasional, tetapi juga mencakup kesepuluh Balai.



19. TPKA Balai berfungsi sebagai penghubung dan mitra kerja TPKA Pusat, serta tim penggerak di lingkup Balai dalam melakukan perubahan.

TPKA. Rancangan Induk menjadi sentral interaksi karena segala perencanaan dan kegiatan berawal darinya. Sebagai contoh TPKA Penelitian, selain berangkat dari Rancangan Induk juga berkaitan dengan TPKA laporan penelitian, TPKA EHPA, TPKA Rumah Peradaban, dsb. Untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kerja masing-masing TPKA diperlukan seorang koordinator. TPAK Pusat dan Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional, dibentuk dengan SK dengan masa kerja pertahun. Dalam operasionalnya tim-tim akan mengadakan pertemuan pertriwulan untuk mendiskusikan kemajuan dan hambatan kegiatan di bawah pimpinan koordinator. Untuk pertanggungjawaban TPKA berkewajiban menyusun laporan tahunan tentang capaian-capaian dan hambatan-hambatan, serta rancangan kegiatan untuk tahun berikutnya.

TPKA Balai

TPKA Pusat tidak sendirian dan lingkup kerjanya tidak sebatas Pusat Arkeologi Nasional, tetapi juga mencakup kesepuluh Balai. Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi di daerah diperlukan partner kerja di masing-masing Balai sebagai mitra diskusi dan mitra dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini TPKA Balai di satu sisi berfungsi sebagai penghubung atau kawan dialog dalam koordinasi Pusat, tetapi di sisi lain sebagai motor penggerak dalam menindaklanjuti perbaikan-perbaikan di Balai, bahkan menginisiasi diskusi-diskusi untuk identifikasi masalah dan solusi pemecahannya. Dibentuk oleh Kepala Balai, TPKA Balai berada di bawah binaan kepala dan pimpinan yang ada dan secara hierarkis menyampaikan laporan kegiatan ke Kepala Pusat Arkeologi Nasional. Sebagaimana di Pusat, Jika dipandang perlu berdasarkan hasil evaluasi, jumlah dan keanggotan TPKA Balai dapat ditambah atau diperpanjang pada tahun berikutnya.

Sekali lagi harus ditekankan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah dialog dengan mengadakan diskusi-diskusi, baik terbatas dengan TPKA Balai maupun lengkap dengan seluruh SDM Balai. Lagi-lagi diskusi – di samping pembinaan - menjadi instrument yang paling ampuh untuk menjembatani kesenjangan, memanfaatkan kelebihan, dan menciptakan sinergi kebersamaan. Perlu diingatkan pula bahwa selain berinteraksi dengan TPKA pusat, TPKA Balai (ini sangat penting) juga berinterkoneksi dengan TPKA Balai lainnya, di bawah koordinasi TPKA Pusat. Inilah yang disebut kebersamaan dengan soliditas dan keselarasan gerak menuju perubahan. Di sini masing-masing TPKA Balai dan TPKA Pusat akan saling memberikan kelebihan dalam mengisi kekurangan-kekurangan. Karena keterbatasan SDM, TPKA Balai untuk sementara disepakati satu untuk setiap Balai Arkeologi dengan jumlah keanggotaan 3 orang atau lebih disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia.

Premis ketiga, sebagai kepanjangan tangan pimpinan dalam mengakselerasi kemajuan, TPKA tidak akan dapat bekerja optimal jika tidak didukung oleh pimpinan. Di sini hendak dikatakan bahwa semua kegiatan TPKA berada dibawah koordinasi pimpinan. Dalam hal ini Kepala Pusat Arkeologi menjadi tokoh sentral dalam TPKA dan Kepala-kepala Balai Arkeologi menjadi penentu keberhasilan di daerah. Dikatakan tokoh sentral karena selain mengkoordinasikan kegiatan di lingkup internal Pusat dan Balai, Kepala Pusat menjadi pejabat yang menyampaikan keberadaan TPKA, meminta dukungan pelaksanaan kegiatannya, dan melaporkan hasil-hasilnya pada pejabat yang membawahi Pusat Arkeologi Nasional. Kepala Pusat juga dalam konteks sinkronisasi dan kerja sama perlu mensosialisasikan konsep TPKA dan program kegiatannya pada institusi terkait. Di lingkup UPT, Kepala Balai Arkeologi menjadi partner TPKA Pusat, pengarah dan koordinator semua kegiatan



20. Premis ketiga, sebagai kepanjangan tangan pimpinan dalam mengakselerasi kemajuan, TPKA tidak akan dapat bekerja optimal jika tidak didukung oleh pimpinan.

TPKA di lingkup Balai yang dipimpinnya, termasuk menginisiasi dan mengarahkan kerjasama-kerjasama sinergis antar-Balai Arkeologi.

Kita Bisa

Kerja, kerja, kerja: "Berbuatlah sesuatu, jangan diam, benahi kekurangan atasi faktor-faktor yang menghambat kemajuan": ajakan ini ditujukan kepada kita semua SDM yang tergabung dalam Keluarga Besar Arkeologi Nasional. Kita bisa karena kita memiliki potensi dan kekuatan untuk berubah. Lihat saja: ada lembaga nasional dengan 10 UPT pendukungnya. Artinya ada belasan pimpinan eselon tiga dan puluhan eselon empat di bawah kepemimpinan Kepala Pusat: bukankah ini sebuah kekuatan besar bagi sebuah lembaga riset nasional jika dikelola dengan manajemen yang baik? Lembaga itu memiliki puluhan peneliti dari berbagai keahlian dengan berbagai pengalaman: bukankah kesemuanya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk memajukan arkeologi Indonesia jika memiliki integritas dan semangat kebersamaan memajukan arkeologi Indonesia? Lembaga ini juga memiliki para teknisi dan staf administrasi: bukankah keberadaan mereka juga sebuah potensi besar untuk mendukung misi arkeologi?

Jika demikian mengapa potensi besar itu selama ini kurang dapat berbuat banyak, bahkan membiarkan lembaga mengalami kemunduran? Jawabannya jelas: kita selama ini cenderung terlena bekerja sendiri atau parsial, sehingga semua kekuatan itu tidak pernah bahu-membahu, bersinergi menghasilkan yang besar. Harus diakui bahwa di sana sini ada-ada saja pimpinan, peneliti, dan teknisi yang menonjol dalam kinerja. Namun betapa hebatnya pun seorang pimpinan, unit kerja, peneliti, atau teknisi, tidak akan memberikan banyak kemajuan bagi arkeologi nasional karena

21. Kita bisa karena kita memiliki potensi dan kekuatan untuk berubah.



22. *Mindset* perubahan: Kerja, kerja, kerja! Mari berbuat yang terbaik bagi lembaga dan arkeologi. Kita benahi kekurangan-kekurangan, kita bangun semangat kebersamaan, dan kita tingkatkan produktivitas penelitian.

sifatnya yang sektoral atau individual. Sebaliknya, kemajuan pasti dicapai jika semua kekuatan dan potensi itu tersinergikan. Kunci untuk menghidupkan potensi itu hanya satu kebersamaan - kebersamaan memajukan arkeologi Indonesia.

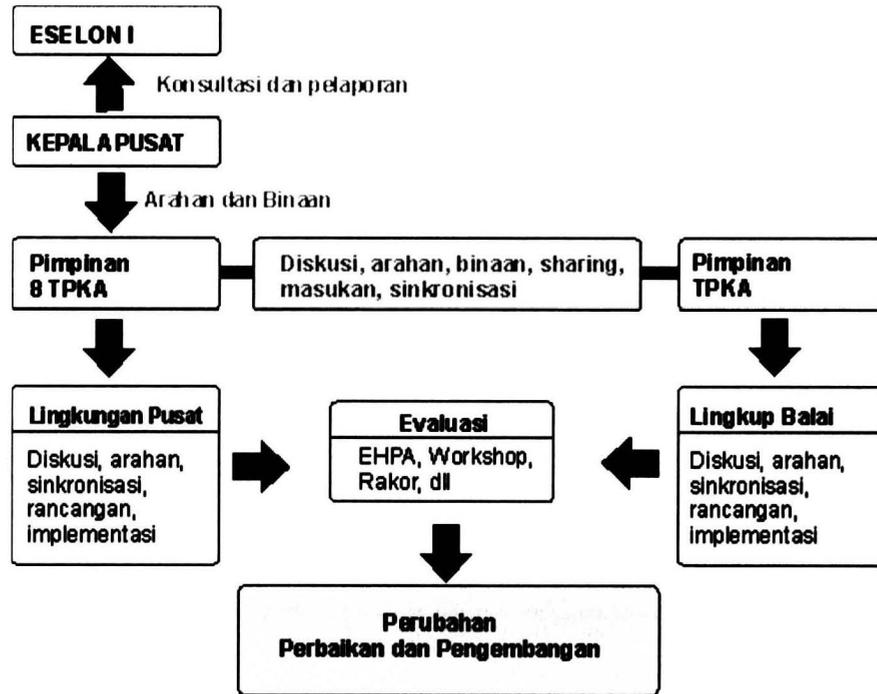
TPKA hadir sebagai motor penggerak kita, TPKA hadir untuk menyadarkan kita akan kekuatan dan potensi itu, mengajak kita semua untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga menyingkirkan hambatan-hambatan dalam menggapai perubahan – kemajuan bersama Pusat Arkeologi Nasional dan kesepuluh Balai Arkeologi penunjangnya. TPKA mengajak kita untuk semakin menumbuhkan inisiatif dan kreatifitas bagi capaian kemajuan lewat pendekatan komunikatif dalam diskusi-diskusi formal dan informal. TPKA menyadarkan kita akan perlunya membangun soliditas, semangat kebersamaan yang kuat untuk maju, mengajak semua potensi untuk bergerak dalam derap yang sama.

“Pusatmu bukan lagi pusatku tetapi pusat kita: Balaimu bukan lagi Balaiku tetapi Balai kita”. Inilah konsep keluarga besar Pusat Arkeologi Nasional. Kita ibarat satu badan yang jika salah satu bagian tidak atau kurang berfungsi akan dirasakan oleh bagian-bagian lain hingga semuanya tidak berfungsi dengan baik. Atas dasar inilah kontribusi bersama sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan sehingga disfungsi atau kemunduran terhindar. Dengan demikian tantangan untuk senantiasa mengaktualisasikan diri menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman senantiasa dapat kita hadapi. Pada titik ini simpul-simpul kemacetan akan terurai dan Pusat Arkeologi Nasional bersama 10 Balai Arkeologi benar-benar mencapai visinya sebagai lembaga yang mengemuka di bidang arkeologi dengan SDM yang mumpuni.

23. Kita punya potensi besar dan beragam, kebersamaan dalam mensinergikan semuanya menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk membawa kemajuan.



24. Pusatmu bukan lagi pusatku tetapi pusat kita: Balaimu bukan lagi Balaiku tetapi Balai kita.



Keterangan:

1. TPKA bekerja berdasarkan konsep kerja yang sudah disepakati bersama melalui proses diskusi yang panjang. Dimulai dari penyusunan draf oleh masing-masing TPKA, kemudian didiskusikan di lingkup terbatas dan lingkup para peneliti

di Pusat, hingga *workshop* yang berlangsung tanggal 4-5 November 2014 di Puncak.

2. Kepala Pusat Arkeologi Nasional menjadi tokoh sentral dalam kegiatan TPKA. Membawahi seluruh TPKA, Kepala Pusat melakukan pembinaan, arahan, diskusi, dan penugasan kepada TPKA Pusat dan Balai. Di sisi lain, Kepala Pusat mensosialisasikan, mengkonsultasikan, dan melaporkan kegiatan TPKA ke atasan (Eselon 1) dan mensosialisasikan kegiatan pada institusi terkait.
3. TPKA Pusat berdasarkan konsep kerja yang disepakati melakukan pembinaan dengan mengadakan diskusi pada jajaran peneliti dan SDM lainnya di lingkup Pusat dan di Balai. Dalam diskusi dilakukan pengarahan kegiatan, sharing ide dan identifikasi masalah, termasuk formulasi rancangan dan implementasi perbaikan. TPKA Pusat dalam melakukan pembinaan di Balai terlebih dulu mendiskusikannya dengan TPKA Balai untuk kemudian bersama-sama melakukan pembinaan dan arahan dengan seluruh staf Balai Arkeologi.
4. TPKA Balai, selain tugas di atas juga menindaklanjuti binaan dan arahan TPKA Pusat dengan melakukan diskusi dan monitoring implementasi kegiatan di lingkup Balai.
5. Kegiatan-kegiatan pembinaan TPKA baik di Pusat maupun di Balai kemudian dievaluasi secara berkala dalam bentuk-bentuk diskusi terbatas atau nasional untuk mengetahui kemajuan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil-hasil evaluasi akan diimplementasikan dalam program kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga perbaikan-perbaikan dan pengembangan dapat dilakukan.
6. Melalui proses ini, cepat atau perlahan, berbagai masalah yang menjadi hambatan perubahan dapat dieliminasi hingga membawa kemajuan di Pusat Arkeologi Nasional dan kesepuluh Balai Arkeologi.



BAB II

KONSEP DAN PROGRAM KERJA TPKA

Dibawah ini akan diuraikan konsep kerja yang lebih rinci dari masing-masing TPKA dalam menjalankan misinya sebagai motor penggerak perubahan. Seperti disinggung dimuka, konsep ini sudah melalui proses diskusi yang panjang dengan penyempurnaan-penyempurnaan. Diskusi penyempurnaan terakhir berlangsung pada workshop yang diselenggarakan di Puncak tanggal 4-5 November 2014, dihadiri oleh tim-tim TPKA, para pimpinan, dan koordinator peneliti di lingkup Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi.

Mengingat tidak semua tim menyerahkan naskah penyempurnaan hasil diskusi *workshop*, serta untuk memberi gambaran yang lebih lengkap tentang masukan-masukan selama diskusi, maka konsep *pra-workshop*, di bagian belakang buku ini dilampirkan juga notulen masing-masing diskusi TPKA. Oleh sebab itu untuk memahami lebih lengkap visi masing-masing TPKA disarankan membaca notulen. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa konsep ini akan senantiasa dimutakhirkan sejalan dengan ide-ide baru yang berkembang dalam diskusi-diskusi yang akan diselenggarakan oleh masing-masing TPKA di Pusat dan di Balai, serta dinamika kelembagaan dan keilmuan arkeologi.



1. TPKA PEMUTAKHIRAN DAN PEMASYARAKATAN BUKU INDUK

Buku Rencana Induk Penelitian Arkeologi sudah lama diluncurkan dan di tengah-tengah itu sudah ada penambahan. Tercatat buku tersebut terbit pada tahun 2004, kemudian tahun 2010 ada penambahan pada tema-tema penelitian. Namun sampai sejauh ini, dapat dikatakan buku tersebut nyaris tidak tersentuh oleh para peneliti baik di Pusat Arkeologi Nasional, maupun di Balai Arkeologi di Indonesia. Apalagi oleh kalangan di luar Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi, seperti Departemen Arkeologi di Universitas atau Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan pertanyaan pada kita, mengapa buku tersebut nyaris tidak dipakai apalagi sebagai pedoman penelitian arkeologi.

Pemerintahan Republik Indonesia yang “baru” di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan segera dimulai pada 20 Oktober 2014. Di bawah kepemimpinannya pembangunan Indonesia akan ditekankan pada masalah kemaritiman dan agraria. Kedua sektor ini, terutama kemaritiman, sudah lama kurang diperhatikan meskipun Indonesia adalah Negara Kepulauan (*Archipelagic State*). Sehubungan dengan keadaan tersebut, Pusat Arkeologi Nasional dalam rencana kerjanya ke depan juga akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Penelitian-penelitian arkeologi hasilnya diharapkan dapat dipakai sebagai masukan pada pemerintah untuk mengembangkan kemaritiman dan agraria. Karena itu beberapa kajian dalam tema-tema yang diusulkan, ada kajian yang mengambil masalah kemaritiman maupun agraria.

Awal tahun 2000, dalam usaha mengembangkan penelitian arkeologi yang terintegrasi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional telah membuat perencanaan yang diwujudkan dalam tema-tema:

1. Siapa dan dari mana kita: migrasi dan proses hunian di Nusantara
2. Interaksi manusia dan lingkungan alam masa lampau



3. Keanekaragaman budaya Nusantara
4. Perdagangan insuler di Nusantara
5. Mencari asal-usul dan persebaran puak-puak Melayu.

Kelima tema utama tersebut, dalam perkembangannya menjadi delapan tema. Tujuh tema merupakan penajaman dari lima tema awal yang telah dikelompokkan berdasarkan periodisasi budaya materi, dan tema terakhir merupakan tema tambahan yang tidak didasarkan atas periodisasi budaya materi.

Kedelapan tema utama tersebut adalah:

1. Manusia purba dan lingkungannya
2. Budaya Akhir Pleistosen – Awal Holosen
3. Budaya penutur Austronesia
4. Peradaban Awal Sejarah
5. Peradaban pengaruh Hindu-Buddha
6. Peradaban pengaruh Islam
7. Peradaban pengaruh Kolonial
8. Arkeologi Maritim dan Arkeologi Publik.

Tema penelitian terakhir seyogyanya dipisah karena keduanya adalah dua hal yang berbeda. Arkeologi Maritim adalah merekonstruksi sejarah maritim Indonesia melalui tinggalan budaya maritim baik yang berupa benda (tangible) maupun tak benda (intangible). Sebagaimana telah dijelaskan pada definisi arkeologi maritim, maka obyek-obyek tinggalan budaya maritim adalah pelabuhan dengan segala fasilitasnya (gudang dan kantor), dok dan galangan kapal, perahu dan kapal (*vesse*l), menara api, pelampung suar (*buoylight*), benteng-benteng laut, bahkan manusianya. Dalam melakukan kajian arkeologi maritim kadang ditemukan artefak yang kita tidak atau belum diketahui fungsinya. Untuk menjawab pertanyaan tentang fungsi suatu benda, maka dilakukan pendekatan etno-arkeologi pada kehidupan masyarakat pantai atau masyarakat pedalaman yang hidup tidak jauh dari sungai/danau.



Arkeologi Publik adalah usaha memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi atau tinggalan budaya masa lampau kepada masyarakat agar masyarakat berperanserta dalam usaha perlindungan dan pelestarian. Arkeologi Publik (Public Archaeology) dapat juga diartikan bahwa arkeologi adalah "urusan" semua orang. Pada pengertian yang terakhir ini masyarakat turut bertanggung jawab atas perlindungan dan pelestarian tinggalan budaya masa lampau yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Pada dasarnya manusia Indonesia yang tinggal di sebuah Negara Kepulauan, mempunyai dua latar budaya, yaitu Budaya Agraris dan Budaya Maritim. Pada awalnya sebelum terjadi perpindahan dari Cina Selatan ke Taiwan, cikal bakal penutur Austronesia sudah mengenal pertanian, dan di Taiwan sudah mengembangkan teknik bercocok-tanam sekaligus sudah mulai mengenal kemaritiman. Dan setibanya di Nusantara mereka telah mahir dalam kemaritiman. Dari latarbelakang budaya tersebut, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam usaha mengembangkan pertanian dan kemaritiman, Pusat Arkeologi Nasional dalam kegiatan penelitiannya diarahkan pada kajian pertanian dan kemaritiman di masa lampau.

Arkeologi adalah urusan semua orang. Dan untuk memasyarakatkan Tema-tema Penelitian agar mudah dimengerti dan aplikatif, sebelum tersusun menjadi sebuah buku induk, terlebih dahulu mendiskusikannya dengan berbagai pihak yang melakukan penelitian arkeologi, seperti pihak dari Direktorat PCBM, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Arkeologi, dan universitas. Untuk efektifitasnya diskusi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD).



2. TPKA RUMAH PERADABAN

Intensifikasi dan diversifikasi media arkeologi untuk publik

PROLOG

- Institusi Penelitian Arkeologi sebagai sentra himpunan data dan informasi adalah sebuah potensi yang memuat nilai penting bagi masyarakat menghadapi masalah aktual dan globalisasi seperti kesinambungan budaya dan peradaban. Arkeologi berperan dalam politik *forgetting* and *remembering* (membangun memori kebangsaan)
- Pengembangan media arkeologi bagi masyarakat luas oleh pusarnas, diperlukan berkaitan dengan manfaat arkeologi bagi publik terhadap kesadaran sejarah itu (bagian dari perubahan mental melalui belajar, pendidikan, menghadirkan pengalaman dan contoh keunggulan dan kehidupan bangsa)
- *Problem* bagi institusi penelitian untuk mengalirkan informasi hasil penelitian pada publik, yang terdiri dari berbagai segmen yang tak setara (ketidaksamaan tingkat pendidikan, ketidaksamaan mendapatkan akses informasi karena jangkauan terhadap pusat informasi publik)
- *Problem* Pengembangan yang kini dilakukan untuk “publik” bersifat ilmiah (jurnal-jurnal) yang memang menjadi standar wajib bagi institusi penelitian, tetapi sasarannya sangat terbatas. Oleh karenanya tidak diabaikan pengembangan media dan forum yang diorientasikan untuk publik seperti (sosialisasi, pameran, dan “semarak arkeologi”) sifatnya temporer, dan sewaktu
- Forum dan media yg dikembangkan tidak cukup dan belum optimal, internalisasi mental diperlukan intensitas (terus menerus), lebih *permanent*. Sementara *stakeholder* “arkeologi” lain tidak selalu sejalan dengan jangkauan penelitian arkeologi yang pada kenyataannya luas
- Undang-undang yang menjadi acuan memberi peluang bagi institusi penelitian untuk



berperan serta dalam penelitian maupun pengembangan, dalam konteks ini adalah revitalisasi dan adaptasi erat kaitannya dengan penelitian

- Gagasan tentang Rumah peradaban dapat dipandang sebagai upaya untuk menghadirkan media arkeologi melalui intensifikasi dan diversifikasi media dalam arkeologi. Sebagai gagasan baru diperlukan kajian dan diskusi untuk memformulasikannya.

TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan :
 - Mendekatkan arkeologi (masa lalu) sebagai bagian dari kebutuhan, pembelajaran dan dalam kehidupan masyarakat
 - Mengurangi kesenjangan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan dalam mewujudkan budaya dan peradaban yang sustainable, berkesinambungan, toleran, dan berdaya saing
 - Membangun bagian dari memori kebangsaan yang penting untuk melawan “lupa”, “salah paham”, dan “pembangunan mental dan karakter”.
- Sasaran :
 - “Membangun” dan membina situs sebagai media dalam pembelajaran kesadaran sejarah bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
 - Mengembangkan informasi publik secara kreatif melalui intensifikasi dan diversifikasi media yang memuat nilai penting sebagai *content* arkeologi dalam kegiatan institusi
 - Membangun jaringan dengan *stakeholder* lain yang berkaitan dengan pengembangan situs (revitalisasi dan adaptasi).



PEMAKNAAN

Rumah peradaban ?

Dua kata yang lebih dulu perlu dimaknai artinya agar tidak terjadi keraguan dan kapastian kapan kata ini akan digunakan dan dalam konteks apa. Kata yang perlu digaris bawah adalah peradaban terjemahan dari civilization. Dari acuan yang bisa ditelusur ada 4 makna selain pengertian lexicalnya :

- Kata dasar civilis (latin), civil, citizen, sampai pada city, centralization
- Kata ini pada abad 18 digunakan menunjukkan oposisi antara barbarian vs civilize (babarbar vs beradab), kolonial menggunakan untuk tujuan rasisme, dunia sehari-hari barangkali kata ini sering menggunakan kata ini untuk mengumpat "biadab lo"
- Kata ini digunakan untuk menggambarkan ciri kemajuan kebudayaan yang sudah mati (revolusi neolitik di berbagai tempat, mesopotamia, babilon, dsb) termasuk gordon childe yang menggunakan untuk mengukur sebuah kemajuan dalam pengertian urban cermin dari masyarakat kompleks
- Kata ini digunakan untuk menggambarkan sebuah proses menunjukkan adanya suatu gerak tahap-tahap maju menuju keadaban
- Akhirnya kata ini dipakai dalam konteks dialog antar lintas negara dalam tingkat kesejajaran membicarakan nilai universal yang adil, untuk maju menghadapi masa depan masing-masing.



PANDANGAN: PILIH MANA?

1. Pengertian No.2, oposisi antara barbar dan beradab, sudah tentu tidak dipilih karena mengimpikasikan pengertian ganda, dan terbatas lebih dari itu konotasinya rasis .
2. Pengertian No.3, biasanya yang digunakan arkeolog, memandang peradab sebagai kata benda. Akibatnya tidak semua kajian masuk, apakah kita pilih ini? tapi masih ada
3. Pengertian yang mengartikan peradaban sebagai kata kerja, sebuah aksi sebuah tindakan yang tidak terikat pada ruang dan waktu seperti No.4, dan No.5 cerminan dari pengetian peradaban bukan dalam konteks objek tetapi menempatkan atau mendudukan arkeolog sebagai kunci

KECENDERUNGAN

Penting untuk menetapkan posisi arkeologi dalam rumah peradaban oleh karena itu peradaban sebagai objek penelitian lebih cocok dilihat sebagai sebagai proses (pengertian No.3) ada konsekuensi atas pilihan pengertian ini yaitu:

- Rumah peradaban direpresentasikan lebih permanen pada sebuah "situs" yang dipandang layak dikembangkan (perlu kriteria untuk itu). Pengertian situs tidak hanya arkeologi tetapi termasuk kantor arkeologi sebagai cermin sentra peradaban itu
- Rumah peradaban bukan sekedar benda-benda tetapi tindakan mencapai kemajuan di masa lalu (ditekankan pada pentingnya peran interpretasi)
- Rumah peradaban ditekankan pada peran/kreativitas dan tindakan arkeolognya/peneliti (pengertian No.4 dan No.5) Mengapa begitu? Arkeologi sesungguhnya tidak berada pada dunia mati (meskipun itu yang kita geluti). Kita berada dalam posisi di antaranya kuno (mati) dan kini (hidup), itulah yang dalam arkeologi moderen disebut Mediation Archaeology, yang ditekankan adalah peran arkeolog di jagad moderen ini bisa berperan sebagai mediator. mediator apa? kuno, kini, dan nanti.



MEDIASI

Rumah peradaban menjadi perangkat mediasi penelitian arkeologi, dimana peneliti memegang peranan sentral. Kata peradaban dalam konteks ini tidak lain:

sebuah aksi, tindakan "mengadabkan" mayarakat kita di masa kini. Menghadirkan informasi dari dunia masa lalu bermakna (tidak semua) sebagai sarana pembelajaran publik.

KONSEKUENSI

- Memilih pengembangan situs dengan kriteria tertentu, termasuk *outstanding universal value* (UNESCO), dan jajak pendapat dengan *stakeholder* lain di daerah maupun di dalam kementerian lain
- Membangun jaringan dengan *stakeholder* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperluas sesuai dengan kebutuhan sebagai bagian dari sinergi dan koordinasi yang kini mendapat perhatian pemerintah
- Pengelolaan informasi arkeologi sebagai bahan baku dalam mengisi *content* rumah peradaban. Standar direktori dari sebuah situs yang di rumah adabkan.

EPILOG

- Diperlukan formulasi *fix* tentang Rumah Peradaban (RP) dan kegiatannya, RP merupakan media dan muara (output dan outcome) dari kegiatan penelitian
- Menyusun sinopsis rancangan situs-situs yang dicalonkan dalam sebuah kajian kelayakan (dari segi penelitian) sebagai bahan komunikasi keterpaduan program, dan pada gilirannya diseminarkan bersama dengan *stakeholder* (didahului seminar intern)
- Penempatan sentra-sentra RP, selain kantor arkeologi “pusat dan balai” diharapkan dapat menjangkau wilayah Indonesia termasuk wilayah terdepan. Tidak selalu perlu mengadakan yang baru tetapi memanfaatkan fasilitas yang ada atau aset daerah.



3. TPKA PENELITIAN ARKEOLOGI: ISU KEBINEKAAN

I. Pendahuluan

1.1 Landasan Dasar

Berbicara tentang kebinekaan, kita harus kembali ke akar katanya yaitu bineka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bineka mempunyai arti beragam atau keberagaman. Kebinekaan kemudian dimaknai sebagai keberagaman. Penelitian arkeologi yang mengambil isu kebinekaan merupakan upaya meneliti kemajemukan Indonesia melalui sudut pandang ilmu arkeologi. Berbagai budaya dari beribu-ribu kepulauan dan terdiri dari berbagai suku bangsa merupakan kekayaan sekaligus keunikan yang tidak terhingga nilainya.

Mengacu pada rencana induk Penelitian Arkeologi Nasional, penelitian tentang kebinekaan merupakan salah satu kebijakan penelitian yang dikeluarkan Pusat Arkeologi Nasional dalam upaya menemukan sekaligus mendeskripsikan keragaman budaya di seluruh wilayah Nusantara dari masa ke masa (lihat naskah akademik Dinamika Keanekaragaman Budaya Nusantara dalam Buku Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional).

Penelitian kebinekaan merupakan kegiatan yang menunjang kebijakan pemerintah yang baru (Jokowi-JK) berupa program Nawa Cita. Dua dari program tersebut merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan Pusat Arkeologi Nasional, yaitu memperteguh kebinekaan melalui peningkatan penggalian nilai-nilai keberagaman budaya yang tersebar di seluruh Nusantara serta melakukan penguatan karakter melalui pengajaran sejarah pembentukan bangsa.



1.2 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang ditinggali oleh berbagai etnis suku bangsa tentunya memiliki kekayaan budaya sekaligus keunikannya yang tiada ternilai. Namun demikian kemajemukan budaya Nusantara memiliki potensi konflik. Mengapa demikian, setiap etnis yang merasa kelompoknya paling tinggi secara tidak langsung akan menonjolkan kebudayaannya masing-masing. Kondisi semacam ini akan memicu terjadinya disintegrasi. Semestinya hal itu tidak akan terjadi seandainya bangsa Indonesia mau menengok kebelakang, mengingat kembali berbagai latar belakang kebudayaan daerah yang beragam bentuk dan sifatnya. Keberagaman budaya daerah yang mempunyai karakter masing-masing akan memberikan pengayaan terhadap khazanah kebudayaan Indonesia. Keberagaman kemudian menjadi tonggak dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengapa demikian?. Bangsa Indonesia yang hidup dalam satuan wilayah luas yang disatukan oleh lautan merupakan suatu kenyataan dari wujud kebinekaan. Oleh sebab itu kesatuan bangsa Indonesia hanya dapat berkembang dari keberagaman yang tumbuh dan subur. Ernest Renan menyatakan bahwa proses membangsa adalah sebuah hasrat bersama untuk bersatu, bukan hanya dalam arti fisik, tetapi juga toleransi aktif untuk saling menerima, menghargai, dan ikut memelihara persatuan. Tanpa kebinekaan maka kesatuan masyarakat akan bersifat semu dan kurang mempunyai daya tahan. Kebinekaan merupakan realitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk itu, dalam upaya mendorong terciptanya kesatuan dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa, keberagaman harus dimaknai oleh masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme berlandaskan kekuatan spiritualitas. Tanpa hadirnya spiritualitas, masyarakat akan sulit menerima dan saling memahami perbedaan yang ditemuinya. Dalam konteks ini, peranan arkeologi sangat penting dalam upaya menggali dan memahami budaya masa lampau untuk dimanfaatkan ke dalam tatanan kehidupan masa kini serta menjadi acuan di masa datang.



Kebudayaan sebagai karya kelompok manusia mengandung sejumlah aspek yang meliputi bahasa, teknologi, mata pencaharian hidup, organisasi sosial, pengetahuan, religi, dan kesenian akan tetapi, karena cara kerja arkeologi lebih cenderung pada benda materi maka unsur yang diteliti lebih mengarah pada sistem teknologi, mata pencaharian hidup, organisasi sosial, religi, dan kesenian. Namun demikian walaupun bahasa dan sistem pengetahuan tidak tampak dalam kajian arkeologi, tetap menjadi perhatian tersendiri terutama ketika peneliti menganalisis data yang memerlukan kajian filologi (prasasti). Budaya materi tidak hanya mempunyai nilai-nilai pengetahuan konkrit, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan etika yang tersembunyi dibaliknya. Apabila nilai-nilai luhur ini diinventarisasi dan diseleksi kemudian dikemas dan ditampilkan dalam konteks kepentingan nasional masa kini, maka niscaya akan memberikan arahan, pengayaan dan ciri khas pembangunan karakter bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran.

II. Permasalahan

- 2.1 Saat ini kita dihadapkan pada menguatnya sentimen dan kekerasan dengan perebutan pengakuan atas kebenaran keyakinan suatu kelompok. Masyarakat yang sebelumnya dikenal toleran dan mempunyai kearifan lokal dalam menanggapi perbedaan-perbedaan, sekarang dengan mudahnya menjadi agresif dan pemaarah. Nampaknya tidak ada ruang lagi untuk mejaga kebinekaan seperti yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
- 2.2 Rapuhnya nilai-nilai toleransi keberagaman juga dipengaruhi oleh globalisasi yang menawarkan nilai universal yang harus dianut semua bangsa. Artinya tidak akan ada kearifan lokal yang ditawarkan oleh globalisasi karena merupakan penyatuan budaya yang disebut sebagai budaya dunia. Kebudayaan akan berkembang apabila ada keseimbangan antara tantangan (*challenge*) dan reaksi (*response*). Kalau tantangan lebih besar, sedangkan kemampuan untuk bereaksi terlalu kecil, kebudayaan akan terdesak. Akan tetapi kalau sebaliknya, justru menimbulkan kreativitas masyarakat.



- 2.3 Kurangnya penelitian arkeologi yang mendiskripsikan gambaran keragaman budaya secara terpadu dari masa ke masa sehingga memberikan penjelasan secara berkesinambungan masing-masing budaya daerah ke dalam satuan ruang kewilayahan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses sejarah kebudayaan Nusantara
- 2.4 Kurangnya penelitian arkeologi yang menggali makna dan nilai-nilai moral dan etika yang tersembunyi dibalik budaya materi yang diteliti.

III. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup:

- 3.1 Faktor-faktor yang berkaitan dengan manusia, budaya, dan lingkungan
- 3.2 Tetap mengacu pada kerangka tema penelitian: Manusia Purba dan Budayanya di Nusantara, Budaya Akhir Plestosen-Awal Holosen di Nusantara, Budaya Penutur Austronesia di Nusantara, Budaya Awal Sejarah di Nusantara, Peradaban Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, Peradaban Pengaruh Islam di Nusantara, dan Peradaban Pengaruh Kolonial di Nusantara
- 3.3 Situs-situs yang ada di wilayah Nusantara (dalam wilayah penelitian 10 Balai Arkeologi)
- 3.4 Penelitian ini tidak merupakan penelitian awal, tetapi merupakan kompilasi data yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian lapangan yang akan dilaksanakan bersifat menambah data yang sudah ada.

IV. Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diungkap, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 4.1.1 Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemajemukan budaya di seluruh wilayah Nusantara dari masa ke masa



- 4.1.2 Mengklasifikasi kekhasan budaya (ciri-ciri khas) pada masing-masing wilayah penelitian
- 4.1.3 Menggali nilai-nilai budaya sebagai kepribadian yang menjadi inti dan ciri budaya masyarakat melalui penelitian arkeologi
- 4.1.4 Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang menyangkut kebinekaan di seluruh Nusantara kepada masyarakat sebagai upaya penguatan dalam membangun kepribadian bangsa.

4.2 Sasaran

- 4.2.1 Mengamati bentuk-bentuk keanekaragaman budaya nusantara sebagai simbol kreativitas masyarakat pendukungnya
- 4.2.2 Mengidentifikasi perbedaan dan persamaan bentuk-bentuk budaya di antara berbagai etnis tertentu dan zaman tertentu di Nusantara
- 4.2.3 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran kebudayaan dari masa ke masa.

V. Output

- 1. Karya monumental berupa buku dengan isu kebinekaan Nusantara yang merupakan gabungan dari hasil penelitian Balar-balar yang disintesakan oleh Pusat (judul perlu dibicarakan pada waktu penyusunan kerangka penulisan)
- 2. Seminar tentang kebinekaan yang mendukung peluncuran buku kebinekaan Nusantara
- 3. Pameran kebinekaan Nusantara
- 4. *Event-event* lain yang diperlukan.



PROGRAM KEGIATAN

Program kegiatan dirancang selama tiga tahun dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007.

I. Kegiatan Tahun 2004

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November (tanggal 3-4) mematangkan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi:

- Sosialisasi Penelitian Kebinekaan Pusat dan Balai-balai
- Mematangkan konsep akademis penelitian Kebinekaan
- Menyusun konsep pelaksanaan kegiatan: Penyusunan RD, Pelaksanaan Kegiatan, Metode yang dipakai, Cara analisis, dan penyiapan database.

II. Kegiatan Tahun 2015

- Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data kebinekaan oleh Balar-balar (termasuk Pusat)
- Monitoring kegiatan pelaksanaan penelitian melalui diskusi-diskusi di lapangan
- Evaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengumpulan data kebinekaan melalui forum EHPA (pengintegrasian hasil penelitian)

III. Kegiatan Tahun 2016

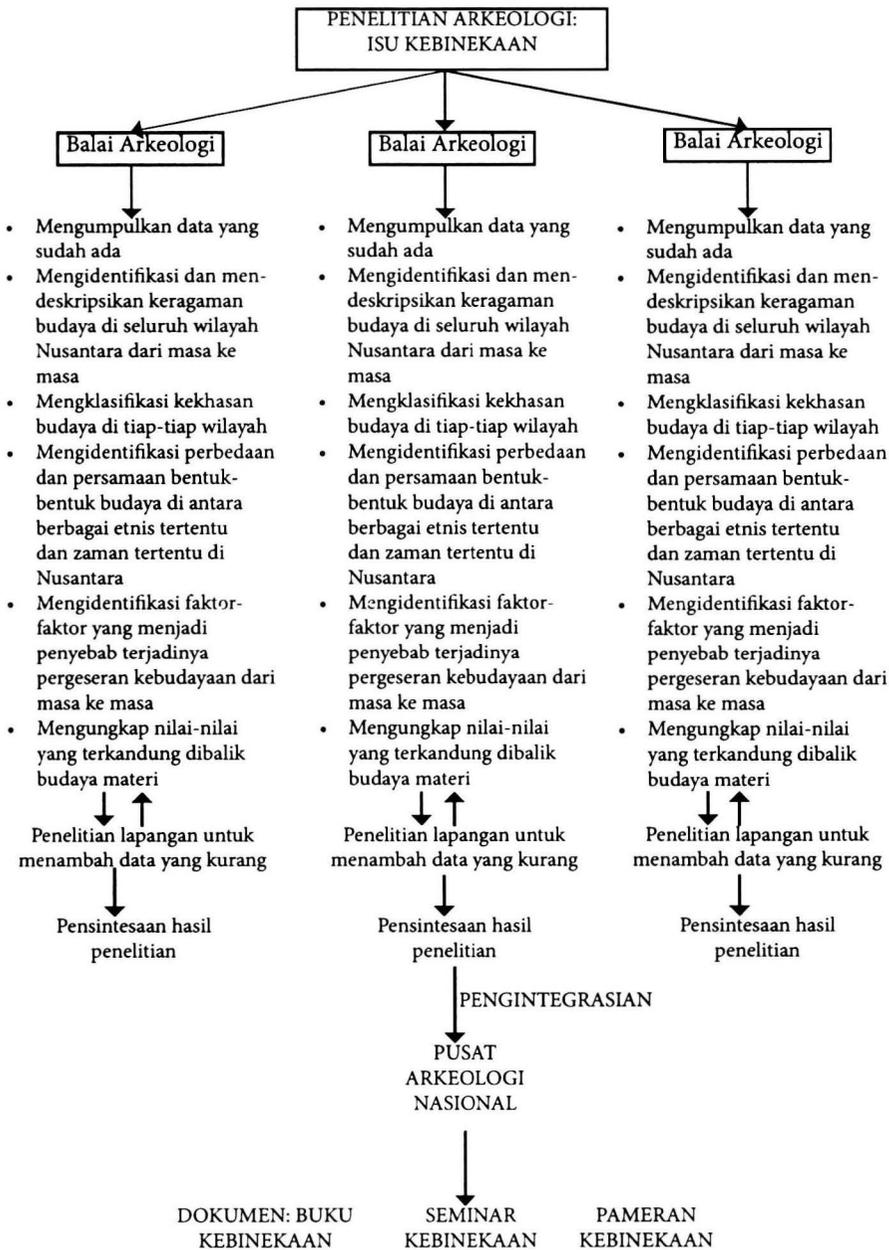
- Lanjutan pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data kebinekaan oleh Balar-balar (termasuk Pusat)
- Monitoring kegiatan pelaksanaan penelitian melalui diskusi-diskusi di lapangan
- Evaluasi hasil kegiatan penelitian dan pengumpulan data kebinekaan melalui forum EHPA (pengintegrasian hasil penelitian)
- Penyusunan proposal yang terkait dengan penulisan buku, seminar, dan pameran (berkoordinasi dengan bidang data dan informasi dan TPKA lain)



IV Kegiatan Tahun 2017

- Pelaksanaan penulisan
- Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data kebinekaan untuk melengkapi kekurangan data
- Monitoring kegiatan pelaksanaan penelitian melalui diskusi-diskusi di lapangan
- Evaluasi akhir dan pengintegrasian hasil penelitian dan pengumpulan data kebinekaan melalui forum EHPA
- Pelaksanaan seminar kebinekaan dan pameran (akhir tahun 2017).





4. TBKA: AKREDITASI

Latar Belakang

Pusat Arkeologi Nasional dan UPT-nya adalah instansi pemerintah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan Arkeologi di Indonesia. Seluruh peneliti memiliki tugas pokok untuk melakukan penelitian dan pengembangan arkeologi secara penuh dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peneliti harus mengikuti seluruh aturan dan prinsip profesionalisme sesuai dengan jenjang jabatan atau pangkat yang telah ditetapkan sehingga peneliti dapat bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI, No 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti. Salah satu wujud hasil kerja peneliti adalah publikasi hasil penelitian dan pengembangan, baik dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terakreditasi maupun karya tulis yang tidak terakreditasi, sesuai Peraturan Kepala LIPI, No.04/E/2012, Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia, 2012, dan Peraturan Kepala LIPI, Nomor 08/E/2013, Tentang Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka jurnal ilmiah yang diterbitkan harus terakreditasi untuk menjaga kualitas dan keseragaman karya tulis ilmiah yang termuat dalam jurnal, sehingga diperoleh pengakuan yang diberikan oleh badan yang berwenang (LIPI), bahwa lembaga yang berkepentingan memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu, mutu standar majalah ilmiah menjadi berkualitas, serta berpengaruh dan dapat dipertanggungjawabkan (Perka LIPI 04/E/2011). Kerja Dewan Redaksi dan Mitra Bestari, gaya penulisan, kelembagaan penerbit, keberkalaan, penampilan, layanan tambahan, penamaan, menjadi substansi utama dalam jurnal terakreditasi.

Ketentuan, peraturan, persyaratan, mekanisme, dan kelengkapan pengajuan akreditasi jurnal ilmiah tercantum dalam Peraturan Kepala LIPI, No.04/E/2012, Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah,



Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia, 2012, dan Peraturan, Kepala LIPI, Nomor 08/E/2013, Tentang Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Permasalahan

Pusat Arkeologi Nasional dan 10 UPT-nya sebagai satu lembaga penelitian sudah menjadikan keharusan untuk memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai salah satu indikator lembaga penelitian yang baik. Namun, pada kenyataannya memiliki jurnal ilmiah terakreditasi dan mempertahankannya bukanlah masalah yang mudah (lihat kondisi jurnal Pusat dan Balar). Banyak kendala, baik yang bersifat internal dan eksternal yang harus dicarikan solusinya (lihat tabel). Bagaimana menuju akreditasi?; bagaimana mempertahankan akreditasi?; serta mencari solusinya? merupakan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Selain itu, masalah yang selalu dihadapi dalam pengelolaan jurnal, baik akreditasi dan tidak akreditasi, adalah kesiapan dan kecukupan naskah. Hal ini yang harus disikapi dan menjadi tanggung jawab peneliti yang menjadi tokoh utama dalam keberlangsungan jurnal ilmiah, peneliti tidak hanya dapat mencari-mengumpulkan data, tetapi juga harus menginformasikan-menyebarkan hasil penelitiannya, baik ke sesama peneliti, pakar lainnya, maupun masyarakat umum. Dalam pada itu, peranan dan pengelolaan serius oleh Dewan Redaksi menjadi tolok ukur keberadaan dan keberhasilan jurnal ilmiah serta harus mendapat dukungan atau support dari pimpinan langsung. Pemilihan dan penyertaan Mitra Bestari juga mempengaruhi keberadaan serta mutu jurnal ilmiah.

Keberadaan jurnal ilmiah terakreditasi juga sangat mempengaruhi dalam penjenjangan atau kenaikan Jabatan Fungsional Peneliti sesuai Peraturan Kepala LIPI No. 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti; karena jurnal ilmiah terakreditasi memiliki nilai 25 AK (angka kredit, II.A.6). Oleh karena itu, untuk monitoring dan mengelola secara terpadu jurnal ilmiah baik di pusat maupun balai, maka diperlukan forum TPKA AKREDITASI.



Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengatasi sejumlah permasalahan terkait dengan keinginan untuk menerbitkan dan mempertahankan keberadaan jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi di Pusat dan 10 Balar.

Tujuan

Forum TBKA AKREDITASI bertujuan antara lain:

1. Mendorong Pusat dan Balar-balar untuk menerbitkan Jurnal ilmiah yang terakreditasi LIPI serta bersama-sama menjaga agar Jurnal ilmiah yang telah terakreditasi dapat dikelola dengan baik;
2. Menghadirkan Jurnal Ilmiah terakreditasi di Pusat dan seluruh Balar ini pada akhirnya dapat mengangkat citra lembaga di tataran Nasional dan Internasional; dan
3. Meningkatkan kemauan dan kemampuan peneliti untuk berkarya melalui media jurnal ilmiah terakreditasi.

Sasaran

1. Tahun 2015 jurnal Balar Ambon dan Bandung sudah terakreditasi
2. Balar-balar terutama yang belum memiliki jurnal terakreditasi sebaiknya mempunyai atau mengaktifkan jurnal yang tidak terakreditasi, untuk menuju menjadi jurnal terakreditasi
3. Tahun 2016 seluruh terbitan Balar harus terakreditasi
4. Melakukan jurnal *on-line* dan e-jurnal.





Kondisi Jurnal Puser dan UPT

Terakreditasi:

- Pusarnas : Amerta, Kalpataru
- Balar Yogyakarta : Berkala Arkeologi
- Balar Denpasar : Forum Arkeologi
- Balar Medan : Sangkhakala

Proses internal menuju akreditasi

- Balar Ambon : Kapata Arkeologi
- Balar Bandung : Purbawidya

Pembinaan (?) untuk akreditasi

- Balar Makasar : Wallenae (pernah akreditasi tetapi dicabut karena tidak ada pengelolaan)
- Balar Manado : Jejak-jejak Arkeologi (masih adakah?)
- Balar Palembang : Siddhayatra (masih adakah?; beberapa terbitan lebih fokus keterbitan publik (ilmiah populer))
- Balar Papua : Papua (jurnal ada, tetapi belum terakreditasi)
- Balar Banjarmasin : Naditira Widya (masih adakah?).

Program Kerja

No.	Tahun	Kegiatan	Sasaran
1	2015	Diklat Penulisan ilmiah bidang Arkeologi	Peneliti muda dan calon peneliti
2		Pendampingan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Balai Arkeologi	Manado, Papua, Makasar
3		Pertemuan Dewan Redaksi Pusat-Balar	Dewan Redaksi
4		Diklat e-journal	Dewan Redaksi
5	2016	Diklat Penyuntingan dengan lembaga terkait Badan Bahasa	Dewan Redaksi
6		Diklat Penulisan ilmiah dan populer	Peneliti
7		Pendampingan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Balai Arkeologi	Palembang, Banjarmasin
8		Pertemuan Dewan Redaksi dan Mitra Bestari Pusat-Balar	Dewan Redaksi



Kondisi Riil Akreditasi Terbitan Pusarnas dan Balar Bulan Oktober 2014

No	Instansi	Nama Jurnal	Akred	Proses	pembinaan	Pengajuan reakreditasi		
						2015	2016	2017
1	Pusarnas	Amerta	v			v		
		Kalpataru	v				v	
2	Blr. Medan	Sangkhakala	v					v
3	Blr. Palembang	Siddhayatra			v			
4	Blr. Bandung	Purbawidya		v				
5	Blr. Yogyakarta	Berkala Arkeologi	v			v		
6	Blr. Denpasar	Forum Arkeologi	v					v
7	Blr. Banjarmasin	Naditira Widya			v			
8	Blr. Makassar	Wallenae			v			
9	Blr. Manado	Jejak-Jejak Arkeologi			v			
10	Blr. Ambon	Kapata Arkeologi		v				
11	Blr. Papua	Papua			v			

Catatan

1. Karya tulis peneliti yang belum memadai, mungkin dampak dari kurang memahami atau tidak membaca peraturan yang telah ada, sehingga seringkali tulisan tidak sesuai dengan standar. Solusi antara lain: pelatihan penulisan ilmiah untuk peneliti;
2. Kurangnya persediaan tulisan sehingga penerbitan sering tertunda dari waktu yang seharusnya. Solusi antara lain: (1) Memperhatikan makalah-makalah yang dipresentasikan di dalam seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah untuk

- dijadikan bank terbitan Pusat dan Balar, (2) Puslit dan Balar-balar harus memiliki bank naskah, sehingga dapat saling mengisi apabila terjadi kekurangan naskah pada waktu penerbitan;
3. Keharusan dukungan dari pejabat atasan langsung untuk kegiatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari;
 4. Koordinasi antara TBKA Akreditasi Pusat dan Balar-balar untuk mensinergikan kerja TBKA Pusat dan Balar (pembinaan dan monitoring)
 5. Kebutuhan pedoman gaya selingkung dan template untuk jurnal ilmiah Pusat dan Balar. Solusi antara lain: penyusunan gaya selingkung secara terpadu untuk hal-hal yang dianggap memiliki persamaan, walau tetap harus ada ciri khusus dari setiap jurnal ilmiah baik di pusat maupun balai;
 6. Keharusan penyertaan Mitra Bestari sesuai kepakarannya dan melakukan penyuntingan sesuai aturan yang berlaku dalam jurnal terakreditasi, karena mempengaruhi penilaian akreditasi;
 7. Kebutuhan akan Open Indeks Sistem yang memuat daftar judul artikel yang sudah diterbitkan di Pusat dan Balar. Gunanya memetakan tulisan-tulisan yang sudah ada, dan juga menghindari duplikasi. Dengan mengumpulkan daftar tulisan tersebut juga dapat menimbulkan ide untuk membuat tulisan yang belum terinformasikan.
 8. Kebutuhan tenaga ahli untuk proses menuju e-Journal, maka diperlukan tenaga yang dapat mengikuti kursus jurnal online yang diselenggarakan oleh di LIPI. Himbuan dari LIPI tahun 2016, e-journal sudah dilaksanakan;
 9. Keharusan pengajuan ulang akreditasi awal tahun 2015 Amerta dan Berkala Arkeologi, harus menindak lanjuti semua yang menjadi catatan bagian akreditasi LIPI; Kalpataru pengajuan ulang akreditasi awal tahun 2016; Forum Arkeologi dan Sangkhakala pengajuan ulang akreditasi awal tahun 2017;
 10. Keharusan mempertahankan akreditasi sesuai aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga akreditasi. Walau jangka waktu akreditasi berlaku selama 3 tahun, namun setiap tahun terbitan jurnal terakreditasi dievaluasi LIPI dan apabila tidak memenuhi persyaratan ataupun aturan akreditasi dapat dicabut sebelum jangka waktu akreditasi habis atau pengajuan ulang akreditasi;





11. Pengajuan akreditasi, dapat dilakukan dari terbitan jurnal yang belum terakreditasi, atau pembuatan jurnal baru sesuai format yang telah ditentukan dalam aturan akreditasi sebanyak enam kali terbitan. Aturan dan ketentuan terdapat dalam presentasi LIPI;
12. Penyebarluasan aturan dan ketentuan akreditasi baik Pusat maupun Balai, terutama Balai yang jurnalnya belum terakreditasi;
13. Balar-balar diharapkan mempunyai jurnal tidak terakreditasi sebagai wadah bagi tulisan peneliti pertama. Jurnal yang tidak terakreditasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi terakreditasi;
14. Mulai tahun 2015 pengajuan berkas kenaikan jenjang peneliti yang menyertakan jurnal terakreditasi harus menyertakan pula *copy* bukti akreditasi jurnal dari LIPI; dan
15. Diperlukan pembimbingan dan komunikasi dari peneliti yang memiliki jaringan dengan jurnal internasional, sehingga banyak peneliti yang dapat menuju menulis di jurnal internasional.

5. TPKA LAPORAN PENELITIAN

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Para peneliti di Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi sebagai lembaga penelitian mempunyai kewajiban membuat laporan. Laporan tersebut merupakan pertanggung jawaban ilmiah para peneliti Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologinya setelah melakukan penelitian. Laporan tersebut berupa Laporan Penelitian Arkeologi (LPA). Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa LPA merupakan salah satu kunci dalam upaya memahami identitas Pusat Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi. Namun sayangnya LPA belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Selama ini LPA tidak dapat diakses oleh masyarakat karena belum diterbitkan kecuali seizin Ketua Tim Penelitian, karena belum diterbitkan.

Pada umumnya, apabila LPA sudah dianggap layak terbit oleh Dewan Redaksi, biasanya diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Berita Penelitian Arkeologi (BPA). Setelah semua penerbitan selalu dikaitkan dengan kum peneliti, maka beberapa tahun belakangan ini BPA tidak terbit lagi. Akan tetapi ada dua Balai Arkeologi, yaitu Balai Arkeologi Medan dan Balai Arkeologi Yogyakarta yang menerbitkan BPA dalam versi baru. Dalam BPA versi baru ini, BPA tidak lagi dalam bentuk laporan yang utuh, akan tetapi sudah berisi artikel-artikel seperti layaknya penerbitan dalam jurnal. Mungkin maksudnya adalah untuk menambah nilai kredit, jika diterbitkan dengan versi seperti itu. Akan tetapi, ada yang dilupakan bahwa BPA sudah mempunyai ciri tersendiri yang merupakan *trademark* Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi-nya.

Dapat dimengerti bahwa usaha tersebut adalah sebagai usaha untuk memberi nilai tambah bagi para penulisnya. Hanya mungkin perlu diingatkan bahwa setiap tulisan atau laporan yang dibuat oleh



peneliti tidak selalu harus dinilai dengan angka kredit. Karena sebagai peneliti yang dibiayai oleh negara berkewajiban memasyarakatkan hasil penelitiannya melalui penerbitan, di antaranya adalah BPA yang jika dinilai dari angka kreditnya sangat kecil.

Sehubungan dengan penulisan LPA, baik di Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai-nya mempunyai aturan-aturan tertentu yang harus diikuti, baik dari aspek ilmiah maupun aspek administratif. Yang dimaksud dengan aspek ilmiah, yaitu bahwa laporan harus terdiri dari pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi, sampai pada kesimpulan dan rekomendasi, diakhiri dengan daftar pustaka. Adapun yang dimaksud dengan aspek administratif adalah dalam kata pengantar menyebutkan nama ketua dan tim penelitian serta tanggal dilaksanakannya sebuah penelitian.

1.2 Dasar Hukum

- a. Keputusan Presiden No. 87/Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS
- b. Keputusan MENPAN No. KEP/128/9/2004 Tanggal 6 September 2004, tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya
- c. Peraturan Kepala LIPI No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

1.3 Permasalahan

Sampai saat ini pembuatan Laporan Penelitian Arkeologi belum seragam isinya, terutama analisis. Belum semua penelitian melakukan analisis, karena ada peneliti yang menggampangkan pekerjaan analisis dan mempunyai pemikiran bahwa untuk analisis ada dana tersendiri, terpisah dari penelitian. Meskipun pada kenyataannya, karena tidak ada dana analisis maka analisis tidak dilakukan. Padahal analisis data sangat penting untuk interpretasi.

Jika semua peneliti sudah mengacu pada penyusunan LPA pada EMPA 2010, maka LPA ini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Akan tetapi nampaknya belum semua peneliti mengacu pada penyusunan LPA



demikian pula dengan pemakaian warna-warna sampul LPA sesuai dengan kesepakatan EMPA 2010. Selain itu, dengan diterbitkannya BPA dalam bentuk artikel maka harus ada kesepakatan apakah BPA ini akan lanjut atau berhenti. Meskipun perlu diingat, jika diberhentikan mempunyai efek terhadap buku Metode Penelitian dan/atau RIPAN yang menyebutkan jenis-jenis terbitan di Pusat Arkeologi Nasional dan Balar (BPA).

Selain hal-hal yang menyangkut keilmiah, yang sering menjadi masalah adalah seringnya peneliti yang menyerahkan LPA tidak sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan (biasanya diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan LPA). Bagaimana penyelesaian masalah ini, apakah harus ada sanksi.

2. Tujuan

- a. Tujuan dari TBKA Laporan Penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Arkeologi dan Balai-balai Arkeologi dapat membuat laporan yang memenuhi syarat ilmiah dan berkualitas
- b. Agar peneliti dapat menulis baik tulisan ilmiah maupun ilmiah populer untuk diterbitkan
- c. Meningkatkan kedisiplinan peneliti dalam pembuatan LPA.

3. Sasaran

- a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM peneliti dalam pembuatan LPA
- b. Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian oleh masyarakatnya
- c. Meningkatnya penyebaran hasil-hasil penelitian arkeologi.

4. Target

- a. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian yang menjangkau masyarakat lokal, nasional, dan internasional melalui LPA



- b. Meningkatkan kualitas LPA yang bermuara pada kepentingan akademis, ideologis, strategis, dan praktis.

5. Program

- a. Menyempurnakan panduan Laporan Penelitian Arkeologi yang sudah dibuat pada EMPA tahun 2010
- b. Mewajibkan peneliti menyerahkan LPA, tidak hanya *hardcopy*-nya saja tetapi juga *softcopy* yang isinya LPA, Laporan Administrasi, Foto dengan keterangan (agar bisa dipakai untuk pameran), dan Laporan Harian
- c. Mengecek semua Laporan Penelitian Arkeologi di Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi, baik berupa *hardcopy* atau *softcopy* secara bertahap. Laporan akan diperiksa kelengkapannya kemudian dikoreksi dan akan dikembalikan untuk dilengkapi
- d. Bersinergi dengan Dewan Redaksi, baik Pusat maupun Balai Arkeologi, untuk menerbitkan Laporan Penelitian Arkeologi sebagai BPA atau artikel
- e. *Workshop* atau setidaknya pembinaan kepada para peneliti seperti mengenai teknik membuat laporan dan teknik menulis karangan ilmiah populer
- f. Membuat sanksi untuk yang tidak menyelesaikan LPA pada waktunya sesuai dengan persetujuan Kepala Pusat dan Kepala Balai

6. Laporan Penelitian Arkeologi

Untuk membuat Laporan Arkeologi yang berkualitas tentunya harus membuat Laporan Penelitian Arkeologi yang memenuhi syarat sebagai sebuah laporan ilmiah. Selain itu juga untuk membuat kerangka penulisan laporan, setidaknya sebuah laporan harus mengacu pada format laporan tersebut. Dari hasil EMPA pada tahun 2010, setidaknya sudah ada kesepakatan: pertama adalah ada format



untuk pembuatan Laporan Penelitian Arkeologi yang harus diacu oleh Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi; kedua adalah untuk sampul (cover) depan, mempunyai warna-warna tertentu untuk membedakan laporan dari Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN

COPY RIGHT

KATA PENGANTAR

Substansi isu penelitian

Lokasi penelitian

Institusi pelaksana

Tanggal pelaksanaan dan Tim penelitian

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR PETA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR FOTO

ABSTRAK (bahasa Indonesia): Berisi tentang permasalahan, metode, dan hasil penelitian

ABSTRACT (bahasa Inggris)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian: Latar belakang sejarah dan riwayat penelitian

1.2 Permasalahan: uraian permasalahan yang akan dipecahkan



- 1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian
- 1.4 Kerangka Pikir dan Metode Penelitian

BAB II KEADAAN LINGKUNGAN DAN HASIL PENELITIAN

- 2.1 Keadaan lingkungan: deskripsi kondisi lingkungan situs sekarang (geografis, geologis, vegetasi, populasi, dll.)
- 2.2. Hasil Penelitian
 - 2.2.1 Survei
 - 2.2.2 Ekskavasi

BAB III PEMBAHASAN

- 3.1 Analisis (dasar-dasar penentuan atribut atau variabel, ruang lingkup analisis, jenis-jenis analisis)
- 3.2 Sintesa (mikro dan makro) dan Interpretasi

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan: Jawaban terhadap pemecahan masalah atau pencapaian tujuan
- 4.2 Rekomendasi: rekomendasi ilmiah (uraian tentang implikasi (prospek penelitian lanjut), dan rekomendasi pemanfaatan pelestarian (prospek perlindungan dan pemanfaatan)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN (kalau ada)

KETENTUAN

- 1. Tampilan dan Tata Letak Halaman:
 - Format : kertas A4
 - Font : Times New Roman 12
 - Spasi : 1,5



Margin : kiri 4 cm, kanan 2,5 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm

Nomor halaman berada di sebelah kanan bawah teks

2. Sampul:

Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di atas tengah

Laporan Penelitian Arkeologi

Judul Penelitian

Oleh : nama penyusun ditulis

Tulisan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tulisan: Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tulisan: Unit kerja

Tulisan: nama kota (khusus Puslitbang Arkenas)

Tahun penelitian

3. Warna sampul:

Pusat Arkeologi Nasional : merah

Balai Arkeologi Medan : hijau tua

Balai Arkeologi Palembang : oranye

Balai Arkeologi Bandung : abu-abu

Balai Arkeologi Yogyakarta : coklat tua

Balai Arkeologi Denpasar : hijau muda

Balai Arkeologi Banjarmasin : kuning cerah

Balai Arkeologi Manado : coklat muda

Balai Arkeologi Makassar : putih

Balai Arkeologi Ambon : biru muda

Balai Arkeologi Jayapura : biru tua



6. TPKA LABORATORIUM

A. Pusat Arkeologi Nasional dan Laboratorium

Sejak berdirinya Pusat Arkeologi Nasional, para perintis lembaga ini telah menyadari pentingnya suatu laboratorium yang mendukung penelitian arkeologi, dan hal ini terlihat pada keberadaan laboratorium tidak hanya di pusat, tetapi juga di Balar Denpasar dan Balar Yogyakarta serta Palrad Bandung. Di pusat sendiri kegiatan laboratorium berada di Bidang Arkeometri, sehingga Bidang Arkeometri waktu itu identik dengan laboratorium.

B. Dasar dan Tujuan Pembentukan Laboratorium

Ada beberapa pengertian tentang laboratorium yaitu 1) Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan; 2) Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain; 3) Laboratorium ialah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia atau bidang ilmu lain, yang merupakan suatu ruangan tertutup, kamar ataupun ruangan terbuka.

Laboratorium Pusat Arkeologi Nasional yang dibutuhkan ditopang oleh lima tiang pokok yaitu:

- Laboratorium yang mempunyai struktur organisasi yang jelas



- Laboratorium yang melakukan kegiatan analisis dan pengolahan data analisis, melakukan preservasi, duplikasi, rekonstruksi, pengujian dan eksperimen
- Laboratorium yang memiliki persyaratan modern dengan memanfaatkan peralatan produk teknologi canggih untuk menghasilkan suatu analisis yang akurat
- Laboratorium yang didukung oleh tenaga multidisiplin yang handal
- Laboratorium yang memiliki prasarana gedung yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan.

Tujuan pembentukan laboratorium Pusat Arkeologi Nasional secara umum adalah menciptakan suatu laboratorium yang representatif yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengolahan data arkeologi, didukung oleh sarana fisik yang memadai, peralatan modern dan ketenagaan yang handal. Sedangkan secara khusus laboratorium tersebut akan memberikan pelayanan analisis laboratoris di lingkungan Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi, serta masyarakat ilmiah maupun umum. Sebagai tempat pengembangan metode dan teknis analisis laboratoris, serta tempat pelatihan guna meningkatkan pengetahuan para analis dan peneliti khususnya dan kalangan akademis serta masyarakat umum dalam menghasilkan olahan data yang menunjang interpretasi.

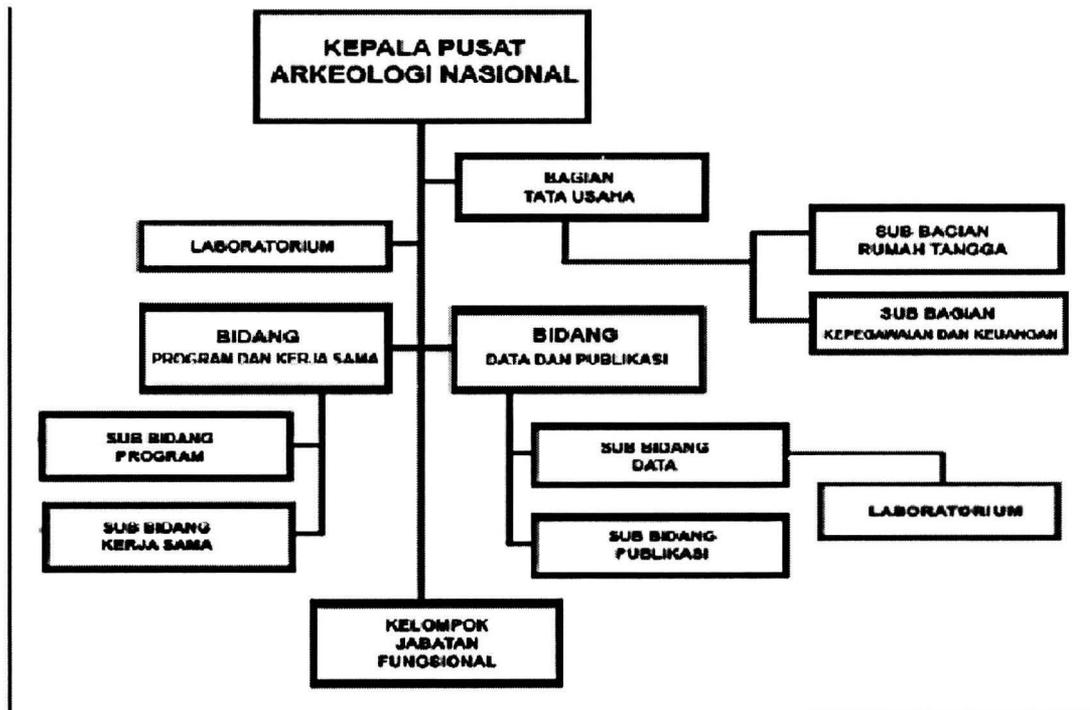
C. Nama, Status, dan Kedudukan

Nama: Laboratorium Pusat Arkeologi Nasional

Status: Laboratorium ini akan dipimpin oleh Kepala Laboratorium, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional. Laboratorium ini menjadi semacam laboratorium sentral bagi Pusat Arkeologi Nasional beserta jajarannya, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan pengembangan laboratorium di Balar-balar. Keberadaan laboratorium di Balar-balar justru semakin mendukung pengembangan arkeologi, tetapi lebih diarahkan pada kegiatan analisis ringan yang dapat memenuhi kebutuhan praktis balar. Laboratorium pusat direncanakan melayani berbagai jenis analisis dari yang ringan hingga ke yang berat.



Kedudukan: Lokasi Laboratorium berada pada Pusat Arkeologi Nasional di Jakarta, yang didasarkan pada alasan praktis untuk lebih mudah melayani kebutuhan-kebutuhan pokok penelitian dan memudahkan proses kerja sama dan koordinasi. Untuk sementara laboratorium dapat menggunakan bangunan laboratorium eks Bidang Arkeometri sambil menunggu pengembangannya di masa datang.



D. Unit-unit Kerja Laboratorium

Sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya, Laboratorium Pusat Arkeologi Nasional direncanakan memiliki tiga unit kerja, yaitu Analisis Artefak, Analisis Ekofak, Preservasi dan Rekonstruksi.

Unit-unit ini beserta jenis-jenis analisisnya merupakan kebutuhan paling mendasar dalam menopang keberhasilan penelitian arkeologi. Jenis-jenis analisis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Artefak

Analisis artefak mencakup

A. Kategori jenis

- Alat-alat masif
- Serpih bilah
- Beliung persegi
- Pipisan dan lumpang
- Mata uang logam
- Stupika, tablet dan meterai.

B. Kategori bahan

- Keramik
 - Tembikar
 - Batuan (*Stone ware*)
 - Porselin
- Kaca
- Logam
- Alat-alat tulang



- Alat-alat Cangkang kerang
- Kayu, batu
- Logam

C. Objek khusus

- Perhiasan
- Rock Art

2. Unit Analisis Ekofak

Unit analisis ekofak mencakup:

A. Analisis Biologi

1. Analisis Arkeobotani
 - Analisis Palinologi
 - Analisis Pytholite
 - Analisis Diatome
2. Analisis Arkeozoologi
 - Analisis Invertebrata
 - Analisis Vertebrata

B. Analisis Geologi

1. Analisis Mineralogi dan Petrologi
2. Analisis Granulometri
3. Analisis Sedimentologi
4. Analisis Petrografi





C. Analisis Kimia

1. Unsur kimia
 - Analisis Metalurgi
2. Non Unsur
 - Analisis Radiometri:
 - Analisis C-14
 - Thermoluminescence
 - Analisis Potasium Argon
 - Electron Spin Resonance
 - Uranium Series Dating.

D. Paleoantropologi

1. Analisis sisa manusia
2. Identifikasi jenis kelamin
3. Identifikasi usia individu
4. Derajat petautan sutura
5. Identifikasi jenis ras.

3. Unit Preservasi dan Rekonstruksi

1. Duplikasi
2. Eksperimen

Preservasi dan rekonstruksi merupakan suatu kegiatan tersendiri dalam laboratorium. Preservasi mencakup pengertian konservasi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk merawat dan mengawetkaninggalan arkeologi yang mengalami pelapukan atau kerusakan. Preservasi juga mencakup upaya

preventif, yaitu perawatan atau pengawetan agar tinggalan arkeologi tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, tetapi tetap dalam kondisi baik.

Kegiatan rekonstruksi (bina ulang) sangat berkaitan dengan preservasi dan dimaksudkan sebagai suatu usaha menyatukan kembali kepingan-kepingan yang ada sesuai dengan kondisi semula untuk mengenal kembali bentuk asli tinggalan. Kegiatan rekonstruksi didahului oleh kegiatan preservasi. Dalam hal ini keberhasilan suatu rekonstruksi sangat ditunjang oleh kelengkapan dan kondisi baik tinggalan. Jika tinggalan sangat fragmentaris dan tinggal sebagian dari benda aslinya, maka hasil rekonstruksi akan sulit membina ulang bentuk utuh benda. Tetapi berdasarkan data banding dan perhitungan, kemungkinan rekonstruksi bentuk utuh dapat dihasilkan di atas kertas.

Unit Duplikasi mempunyai kegiatan di bidang pembuatan duplikasi atau penggandaan duplikasi suatu tinggalan untuk berbagai kepentingan. Pembuatan duplikasi pada umumnya ditujukan pada tinggalan yang memiliki nilai arkeologi yang sangat tinggi. Pentingnya pembuatan duplikasi suatu benda dapat dilihat dari beberapa sudut:

- Dari sudut penelitian, yaitu di kala tinggalan letaknya jauh atau sulit diakses, sehingga keberadaan duplikasi akan sangat praktis.
- Dari sudut keamanan, benda-benda asli tidak dapat diakses setiap orang yang membutuhkan, sehingga sebagai gantinya perlu duplikasi.
- Dari sudut pemasyarakatan, baik melalui pameran, peragaan permanen di museum-museum, dan lain-lain sangat memerlukan duplikasi.

Unit Eksperimen yaitu percobaan-percobaan pembuatan suatu benda tiruan untuk mengetahui proses teknologi yang berlangsung dalam pembuatan suatu benda arkeologi, dari tahap awal sampai pada tahap akhir. Kegiatan ini juga dapat mengetahui teknik-teknik pemakaian atau fungsi suatu benda melalui percobaan-percobaan yang dilakukan. Eksperimen merupakan salah satu metode penting dalam arkeologi karena keterbatasan data arkeologi itu sendiri. Kekosongan data secara hipotesis dapat diisi melalui hasil eksperimen.



E. Kondisi Laboratorium Yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan untuk terciptanya sebuah laboratorium yang ideal dan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam menunjang penelitian arkeologi, maka persyaratan dasar adalah dapat memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi selama ini. Secara lebih rinci persyaratan tersebut meliputi enam unsur pokok, yaitu status kelembagaan, kegiatan, ketenagaan, peralatan, prasarana, dan pendanaan.

1. Status

- Laboratorium akan dipimpin oleh seorang kepala agar dapat mengorganisasikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, serta bertanggung jawab langsung ke kepala pusat
- Ketenagaan dalam laboratorium sebaiknya dikhususkan para ahli disiplin lain dari arkeologi dibantu dengan tenaga asisten analis yang mencukupi. Analisis arkeologi dapat dilaksanakan dalam laboratorium, tetapi statusnya berada dalam organisasi bidang.

2. Kegiatan

- Menciptakan laboratorium yang mempunyai kegiatan lengkap untuk keberhasilan penelitian arkeologi, meliputi unit analisis, preservasi dan rekonstruksi, duplikasi dan eksperimen
- Pelaksanaan berbagai kegiatan dalam setiap unit kerja menuntut organisasi yang lebih baik, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

3. Ketenagaan

- Untuk kelancaran pekerjaan analisis laboratoris, diharapkan tenaga-tenaga analis berkualitas yang sesuai dengan jenis analisis yang dibutuhkan dalam penelitian arkeologi
- Menjadikan laboratorium Pusat Arkeologi sebagai suatu tempat pelatihan bagi tenaga-tenaga analisis dari instansi lainnya.



- Konsepsi pengembangan harus diawali dengan pembentukan laboratorium, kemudian pengembangan tenaga-tenaga analis maupun asisten analis, melalui pelatihan-pelatihan. Dengan pengembangan tenaga-tenaga tersebut, berarti kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya bermuara kepada hasil-hasil penelitian arkeologi.

4. Peralatan

- Pengadaan peralatan untuk analisis thermoluminescence
- Melengkapi peralatan analisis unsur kimia, seperti cawan platina, cawan nikel, penjepit cawan, agate stone, lampu benzena, spektrofotometer sinar UV, pH meter, dan peralatan gelas
- Melengkapi peralatan analisis palinologi, antara lain centrifuge, polyethylene beker, waterbath, alat balance (kesetimbangan), touchmixer (alat pengocok endapan).
- Melengkapi peralatan analisis metalurgi, seperti bola baja, gerinda, spektrofotometer sinar-X, dan alat-alat gelas
- Melengkapi peralatan analisis sedimentologi, antara lain test sieve (ayakan)
- Melengkapi peralatan analisis petrografi, antara lain mikroskop polarisasi, tustel mikroskop, mesin pemotong batuan
- Melengkapi peralatan analisis arkeologi, antara lain mikroskop, neraca analitik, kaliper, dan lain-lain.

Unit analisis lainnya telah memiliki peralatan dasar dalam arti dengan peralatan tersebut telah dapat melaksanakan analisis, walaupun masih membutuhkan peralatan baru. Di antaranya adalah analisis mikroforaminifera, analisis sisa manusia, analisis sisa fauna, analisis sifat fisik, analisis petrologi, analisis mineralogi, dan analisis mineral berat, serta unit duplikasi dan eksperimen. Unit preservasi dan rekonstruksi masih membutuhkan peralatan, seperti vibrator, battery charger, ultrasonic cleaner, bak aluminium, desikator, vacuum pump, loupe, dan mikroskop.



5. Prasarana

- Membagi ruang per-unit analisis yang memiliki alat pengontrol temperatur (AC, Exhaust fan) dan kelembaban
- Menciptakan ruang dan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan laboratorium secara tersendiri, untuk memudahkan pengontrolannya
- Membuat bak penampungan limbah (*water treatment*).

6. Pendanaan

Pendanaan yang cukup merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan kegiatan laboratoris, sehingga perlu menjadi perhatian pokok.



F. Laboratorium Balai Arkeologi

Laboratorium sangat penting bagi suatu lembaga penelitian yang berperan untuk mendapatkan data dalam pemecahan masalah penelitian arkeologi.

Suatu laboratorium yang diperlukan adalah:

- Ruang yang nyaman untuk bekerja
- Peralatan yang mendukung pekerjaan analisis

Untuk kemajuan laboratorium di Balar-balar diperlukan laboratorium berdasarkan potensi dari wilayah serta keahlian yang dimiliki balar ybs, sehingga dalam hal ini Ada 2 jenis laboratorium yaitu laboratorium umum dan laboratorium khusus. Laboratorium umum akan sama jenisnya di setiap balar, namun untuk laboratorium khusus, setiap balai arkeologi akan berbeda antara balar yang satu dengan balar yang lain seperti pada contoh dibawah ini:

No	Balai Arkeologi	Lab. Khusus	Lab. Umum
1	Medan	?	Analisis Arkeologi
2	Palembang	?	Analisis Arkeologi
3	Bandung	?	Analisis Arkeologi
4	Yogyakarta	?	Analisis Arkeologi
5	Banjarmasin	?	Analisis Arkeologi
6	Denpasar	?	Analisis Arkeologi
7	Makassar	?	Analisis Arkeologi
8	Manado	?	Analisis Arkeologi
9	Ambon	?	Analisis Arkeologi
10	Papua	?	Analisis Arkeologi

G. Laboratorium Ideal, Keharusan Bagi Kemajuan Arkeologi

Kehadiran sebuah laboratorium merupakan suatu keharusan bagi institusi penelitian Pusat Arkeologi Nasional. Kepentingan, manfaatnya dan alasan yang paling mendasar karena kegiatan laboratorium merupakan bagian dari penelitian itu sendiri. Pembentukan laboratorium tersendiri menjadi kebutuhan mendesak.

Pembentukan laboratorium yang ideal dan representatif sangat dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penelitian arkeologi. Laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala laboratorium bertanggung jawab langsung ke kepala pusat, didukung oleh prasarana yang memadai, peralatan dan bahan yang modern, ketenagaan yang profesional, kegiatan yang terorganisasi rapih, dan yang terpenting lagi pendanaan yang memadai. Realisasi rencana ini akan mendorong kemajuan



dalam penelitian dan perkembangan arkeologi, meningkatkan kredibilitas Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi sebagai lembaga penelitian di lingkup nasional dan internasional.

Laboratorium ideal untuk laboratorium umum diperlukan alat sebagai berikut:

- Ruang yang nyaman (AC/Exhaust van)
- Mikroskop
- Neraca analitik
- Kaliper
- Loupe
- Dental tool, dll.

Laboratorium khusus diperlukan alat-alat yang disesuaikan dengan kebutuhan/potensi/sdm yang dimiliki Balai-balai.

Kini saatnya untuk merealisasikan pembentukan laboratorium yang ideal dan representatif, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan penelitian arkeologi. Laboratorium yang dipimpin oleh seorang kepala laboratorium bertanggungjawab langsung ke kepala pusat, didukung oleh prasarana yang memadai, peralatan dan bahan yang modern, ketenagaan yang profesional, kegiatan yang terorganisasi rapih, dan yang terpenting lagi pendanaan yang memadai. Realisasi rencana ini akan mendorong kemajuan dalam penelitian dan perkembangan arkeologi, meningkatkan kredibilitas Pusat Arkeologi Nasional dan Balai-balai Arkeologi sebagai lembaga penelitian di lingkup nasional dan internasional.



Daftar Pustaka

- Arfian, 1993 Evaluasi dan Pengembangan Kegiatan Analisis Fosil Pollen di Bidang Arkeometri. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Aziz A. Fadhila, 1993 Arah dan Kebijakan Penelitian Arkeologi di Bidang Arkeometri Selama PJPT I. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Aziz A. Fadhila, 1997 Arah dan Aplikasi Penerapan Metode Ilmu-ilmu Keras Dalam Perspektif Penelitian Arkeologi. Buletin Arkeologi AMOGHAPASA. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Provinsi Sumatera Barat & Riau. No.6/III/Maret/1997.
- Eriawati, Y.J., 1993 Penelitian Arkeometri Dalam Penelitian Arkeologi. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Intan S. Fadhlan M., dan Marsudi Utomo, 1991 Pelatihan di Geologi Kwartir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung. Proposal Bidang Arkeometri, 1991.
- Intan S. Fadhlan M., 1992 Pelatihan Analisis Laboratorium di Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung. Proposal Bidang Arkeometri, 1992.
- Intan S. Fadhlan M., 1993 Pengembangan Sumberdaya Bidang Arkeometri. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Intan S. Fadhlan M., 1994 Teknis Penelitian Bidang Arkeometri Dalam Menunjang Penelitian Arkeologi. Bidang Arkeometri, Puslit Arkenas, 1994.
- Intan S. Fadhlan M., Sukendar Haris, 1998 Arah dan Strategi Kebijakan Bidang Arkeometri Dalam Menunjang Penelitian Arkeologi. EHPA Cipayung, 16-20 Februari 1998.
- Intan S. Fadhlan M., Sukendar Haris, 1999 Penerapan Studi Arkeometri Dalam Arkeologi. Majalah Kebudayaan, No. 15 Thn. VIII 1998 /1999, Depdikbud.
- Intan S. Fadhlan M., 2000 Ketika Bidang Arkeometri Dilebur, Laboratorium Harapan Terakhir. EHPA Bedugul, Bali, 12-20 Juli 2000.





- Intan S. Fadhlan M., 2014 Laboratorium Eks Bidang Arkeometri (Sumber DATA atau Sumber DANA). EHPA Bandung, 11-15 Agustus 2014.
- Mundardjito, 1994 Arkeologi-Ekologi: Perspektif Ekologi Dalam Penelitian Arkeologi. EHPA Palembang, 11-16 Oktober 1994.
- Sedyawati Edi, 1996 Tantangan Untuk Sepuluh Tahun Lagi. PIA IAAI, 12-16 Maret 1996.
- Soejono, R.P., 1989 Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai Aparatur Pemerintah dan Lembaga Ilmiah. Penataran Intern Capeg Puslit Arkenas Tkt III 19-28 Oktober 1989. Jakarta.
- Soejono, R.P., 1996 Langkah-langkah Institusional dan Masa Depan Arkeologi Indonesia. PIA-IAAI VII, Cipanas, 12-16 Maret 1997.
- Soejono, R.P., 2000 Arkeologi di Indonesia Dalam Perspektif Global. EHPA Bedugul, 14-17 Juli 2000.
- Sudiono, 1993 Orientasi Penelitian Arkeometri Dalam PJPT II. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Sukendar Haris, 1993 Arkeometri Menjelang PJPT II. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Sukendar Haris, 1996 Sumbangan Arkeometri Dalam Studi Arkeologi. EHPA Ujung Pandang, 20-26 September 1996.
- Triwuryani R.R., 1993 Arah Program Penelitian Bidang Arkeometri Selama PJPT I. EHPA Yogyakarta, 26-30 Juli 1993.
- Truman H. Simanjuntak, dkk., 2000 Pembentukan Laboratorium Pusat Arkeologi Departemen Pendidikan Nasional. Naskah Akademis, Pusat Arkeologi, Depdiknas.

7. TPKA BIDANG EVALUASI HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI

I. Latar Belakang

Pusat Arkeologi Nasional adalah lembaga eselon dua di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Institusi ini merupakan salah satu unit kerja yang berperan sebagai lembaga riset nasional dalam bidang Arkeologi. Sebagai lembaga riset yang berwenang melakukan kegiatan penelitian arkeologi, Pusat Arkeologi Nasional mempunyai kewajiban bertanggungjawabkan seluruh hasil penelitiannya kepada pemerintah maupun masyarakat luas. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan sosialisasi, antara lain melalui kegiatan pertemuan ilmiah, seminar, sarasehan, publikasi, pameran, maupun dalam bentuk media elektronik (website) dsb.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hasil-hasil penelitian yang dilakukan Pusat Arkeologi Nasional adalah melalui forum pertemuan ilmiah yang dinamakan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi yang disingkat EHPA. Kegiatan pertemuan ilmiah ini diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh para peneliti di seluruh jajaran Pusat Arkeologi Nasional dan Unit Pelaksana Teknisnya (Balai Arkeologi). Secara umum, maksud dan tujuan evaluasi adalah untuk membahas hasil-hasil penelitian yang sudah, sedang, dan akan dilakukan serta membuat perencanaan ke depan agar lebih baik dan terarah. Hasil evaluasi berupa rekomendasi yang harus selalu dikawal dan ditindak lanjuti. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut tidak hanya membahas tentang hasil-hasil penelitian arkeologi saja, tetapi juga menyangkut masalah metodologi dan teknis dalam penelitian, kebijakan, dan tematik.

Khusus mengenai Evaluasi Metode Penelitian Arkeologi (EMPA) yang juga menjadi program Pusat Arkeologi Nasional ini dirancang pelaksanaannya setiap 3 tahun sekali. Adapun tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan meng-*update* metode, maupun teknik-teknik baru sesuai



perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mungkin dapat diterapkan dalam penelitian arkeologi terkini. Kegiatan ini juga masih memerlukan berbagai bentuk penajaman dalam bentuk atau format kegiatannya untuk memperoleh hasil yang diharapkan lebih efektif dan berdaya guna.

II. Problematik

- Rekomendasi yang dihasilkan dari setiap pertemuan EHPA banyak yang tidak ditindaklanjuti
- Tema EHPA seringkali tidak sinkron/sejalan dengan Rencana Strategis yang digariskan Pusat Arkeologi Nasional atau lembaga di atasnya
- Pembentukan Tim Pengawal/Pengawas EHPA tidak berjalan
- EHPA seakan menjadi ajang pertemuan rutin tahunan (reuni ?) dan hanya mempertanggungjawabkan proyek saja
- Tidak ada sinkronisasi antara EHPA yang diselenggarakan Balar (UPT) dengan tema Arkenas, sehingga penyelenggaraan EHPA Balar harus dihadiri Tim TPKA
- Berkurangnya rasa memiliki kegiatan EHPA oleh peserta/peneliti yang ditandai dengan menurunnya partisipasi aktif dari peserta (dalam pembuatan makalah, aktivitas dalam diskusi, dsb).

III. Maksud dan Tujuan

- Memberikan solusi dan pengarahan
- Merealisasikan hasil-hasil rumusan EHPA
- Memberikan arahan tentang tema-tema EHPA sesuai kebijakan Arkenas melalui Renstra dan isu-isu yang berkembang



- Sebagai fungsi kontrol dalam pelaksanaan 7 tema (plus 2) sesuai yang digariskan dalam buku RIPAN
- Merangkum kegiatan EHPA yang dilakukan oleh Balar-balar dan menyaring (sebagai *filter*) untuk penyelenggaraan EHPA Nasional
- Penyelenggaraan EHPA dengan konsep lain/berbeda untuk menghindari kejenuhan, misalnya melalui pembuatan poster-poster atau eksperimen dan untuk menarik minat para peneliti
- *Output* EHPA bukan berupa rumusan, tapi semacam buku yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan KTI yang siap diterbitkan dalam jurnal terakreditasi
- Membuat penilaian untuk setiap makalah dalam penyelenggaraan EHPA; tujuannya untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kualitas peneliti
- Penyelenggaraan EHPA dalam 3 (tiga) tahun mendatang bersifat umum agar semua peneliti dapat mengikuti
- Menjadwalkan kegiatan EHPA secara bergilir dengan mengacu pada lokasi 10 Balar yang ada.
- Membentuk *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC)
- Menekankan kembali porsi tugas *Steering Committee* (SC) selaku tim pengarah kegiatan dan *Organizing Committee* (OC) selaku pelaksana kegiatan yang akan dibentuk setiap periode/kegiatan

Steering Committee (SC) yang akan diampu oleh penanggung jawab tema penelitian

- Menentukan tema ehpa
- Merancang *out line synopsis*
- Mempertimbangkan usulan TBKA mengenai calon Ketua EHPA untuk diputuskan Kapus
- Melakukan pengawalan terhadap setiap hasil rumusan dan rekomendasi EHPA serta memberikan masukan kepada Kepala Pusat Arkeologi Nasional.





Organizing Committee (OC); yang akan diampu oleh peneliti:

- Menyusun kelengkapan panitia pelaksana
 - Menjabarkan/membuat *out line* ke dalam naskah sinopsis lengkap
 - Melaksanakan kegiatan EHPA
 - Melaksanakan semaksimal mungkin penggalangan sponsor dan melibatkan media cetak dan elektronik
 - Mengembangkan bentuk kegiatan maupun format diskusi yang bervariasi
 - Mengembangkan kegiatan EHPA dalam bentuk kegiatan maupun format diskusinya (misalnya dengan meningkatkan/mengadakan kembali suplemen kegiatan baik berupa *workshop* tentang alat batu, alat logam, arca, tulang, tembikar, keramik, naskah dsb.); pameran; festival dsb untuk menghindari rutinitas
 - Menyusun laporan pelaksanaan EHPA.
- Memperjelas cara penentuan tema EHPA, Ketua Panitia dan penentuan lokasi.
 - Meningkatkan apresiasi peserta EHPA akan pentingnya kegiatan ini dengan meningkatkan peran Balar-balar yang ada dalam kegiatan antara lain melalui usulan tema yang relevan untuk tahun-tahun ke depan
 - *Me-review* kembali hasil rumusan EHPA 5 tahun terakhir yang masih *up to date* untuk dapat segera direalisasikan sesuai dengan isu-isu terkini yang berkembang.

IV. Program dan Rencana Kerja

- Membuat rencana dan program kegiatan EHPA sesuai kebijakan Renstra Arkenas dalam 5 tahun ke depan (2015-2019)
- Mengusulkan Program EHPA hingga 5 tahun ke depan
- Penyelenggaraan EHPA dalam 3 (tiga) tahun mendatang bersifat umum agar semua peneliti dapat mengikuti
- Melakukan sinkronisasi antara tema EHPA Pusat dan Balar

- Membuat jadwal secara berselang pertahun jika memungkinkan antara kegiatan EHPA yang bersifat tematik terencana, dengan kegiatan EHPA yang bersifat tematik sesuai isu terkini, atau kegiatan EHPA yang bersifat kebijakan yang terkait penelitian atau gabungan ketiganya dalam setiap kegiatan EHPA.

NO	TEMA	TEMPAT	WAKTU	KEGIATAN PELENGKAP	
				JENIS KEGIATAN	PELAKSANA
1	Kebinekaan/keragaman: Adaptasi dan Sistem Perdagangan pada Masa Lampau di Indonesia	Semarang	Oktober/ November 2015	Pameran	Datin/Balar
2	Kebinekaan/keragaman: Kemaritiman dan Sistem Transportasi air dari masa Prasejarah sampai Kolonial di Indonesia	Ambon	Oktober/ November 2016	Workshop/ Pameran	Datin/Balar
3	Kebinekaan/keragaman: Hubungan Antar Budaya dan Bahasa Berpenutur Austronesia di Indonesia	Jayapura	Oktober/ November 2017	Workshop/ Pameran	Datin/Balar
4	Manusia, Budaya dan Lingkungannya pada Masa Lampau di Indonesia	Manado	Oktober/ November 2018	Workshop/ Pameran	Datin/Balar
5	Masyarakat Bahari dalam konteks Kemaritiman Nusantara	Makassar	Oktober/ November 2019	Workshop/ Pameran	Datin/Balar



- Membuat rencana dan program kegiatan EMPA sesuai kebijakan Renstra Arkenas dalam 3 tahun/sekali mulai tahun 2016
- Mengusulkan seminar bertema kebijakan yang diselenggarakan tersendiri dalam rapat koordinasi antara pimpinan (pejabat struktural), Pakem dan Korlit
- Mengusulkan forum kegiatan yang berkaitan dengan musyawarah dan pengembangan
- Merencanakan Seminar Nasional/Internasional setiap 2 (dua) tahun sekali mulai tahun 2016

NO	TEMA	TEMPAT	WAKTU	KEGIATAN PELENGKAP	
				JENIS KEGIATAN	PELAKSANA
1	Human Evolution, Dispersal and Adaption in Indonesia-Southeast Asia	Solo/ Denpasar	2016	Seminar/ Pameran	Arkenas-Internasional
2	Jalur Rempah Nusantara dalam konteks regional-internasional	Indonesia Bagian Timur	2018	Seminar/ Pameran	Arkenas-Internasional
3	Pelayaran, Perdagangan dan Pelabuhan Masa Hindu-Buddha di Nusantara	Jakarta	2020	Seminar/ Pameran	Arkenas-Nasional/ Internasional

- Melakukan kegiatan pembinaan dan perencanaan EHPA dengan Balar-Balar

NO	MATERI	WAKTU	LOKASI	PELAKSANA
1	Pelaksanaan EHPA, diskusi ilmiah yang lain	2015	Ambon, Jayapura	TBKA EHPA
2	Pelaksanaan EHPA, diskusi ilmiah yang lain	2016	Manado, Makassar	TBKA EHPA
3	Pelaksanaan EHPA, diskusi ilmiah yang lain	2017	Banjarmasin, Medan	TBKA EHPA
4	Pelaksanaan EHPA, diskusi ilmiah yang lain	2018	Palembang, Bandung	TBKA EHPA
5	Pelaksanaan EHPA, diskusi ilmiah yang lain	2019	Yogyakarta, Denpasar	TBKA EHPA

8. TPKA STANDARDISASI UPT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi memerlukan suatu patokan atau pedoman yang dijadikan sebagai pegangan untuk menjalankan segala kegiatannya. Patokan atau pedoman tersebut tentunya harus memenuhi standar-standar tertentu agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan ideal. Pusat Arkeologi Nasional sebagai induk organisasi bagi seluruh Balai Arkeologi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dipandang perlu mempunyai standar atau regulasi terhadap faktor-faktor tertentu yang dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh Pusat Arkeologi Nasional sebagai unsur Pembina.

Salah satu faktor pendukung penting di dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tentang kualitas dan kuantitas SDM yang dalam hal ini meliputi seluruh pegawai baik staf maupun pimpinan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kualitas adalah sejauh mana kemampuan seseorang dapat menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalin kerja sama yang baik dengan sesama pegawai serta peran aktifnya dalam kelembagaan. Sementara itu yang berkaitan dengan kuantitas diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terhadap beban kerja.

SDM, dalam hal ini meliputi pegawai baik di pusat maupun pegawai yang berada di daerah diharapkan memiliki kualitas yang dapat mendukung berjalannya lembaga sebagai sebuah organisasi. Kualitas dimaksud diharapkan dapat menangani permasalahan manajemen SDM itu sendiri, sarana prasarana, serta tujuan yang ingin dicapai.



Dalam beberapa dekade belakangan ini, Pusat Arkeologi Nasional sebagai lembaga pembina terhadap balai-balainya kurang dapat menerapkan fungsinya sebagai lembaga Pembina. Beberapa Balai menginformasikan bahwa selama ini terkesan tidak tampak adanya kegiatan pembinaan atau pengarahan yang terstruktur dan terarah dari Pusat Arkeologi Nasional sebagai lembaga pembina, khususnya terhadap kebijakan-kebijakan dan pengembangan balai-balai sebagai organisasi bagian dari Pusat Arkeologi Nasional. Berdasarkan isu-isu seperti ini, maka Pusat Arkeologi Nasional mencoba untuk kembali menjalankan perannya sebagai lembaga pembina dengan menyusun standardisasi aktivitas kelembagaan yang meliputi pengelolaan SDM, sarana prasarana serta tujuan yang ingin dicapai.



B. Permasalahan

Akibat dari kurang berjalannya fungsi Arkenas sebagai pembina Balar-balar, menimbulkan berbagai permasalahan atau ketimpangan antara balar yang satu dengan yang lain. Apabila diperinci maka akan tampak sebagai berikut:

- Ketimpangan dalam hal jumlah peneliti dan tenaga teknis antara balar yang satu dengan lainnya;
- Belum ada sistem karir yang jelas berkaitan dengan jenjang karir dan promosi jabatan;
- Belum adanya penerapan *reward* dan *punishment* terhadap kelembagaan;
- Belum meratanya sarana prasarana;
- Tidak adanya arahan kebijakan yang lebih terarah, tegas dan kongkrit dari pusat terhadap seluruh balar-balar;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

1. Mewujudkan komposisi sumber daya manusia yang ideal dalam hal kualitas dan kuantitas
2. Mewujudkan standarisasi tata kelola sarana dan prasarana
3. Mewujudkan standarisasi tata kelola data dan informasi
4. Terciptanya standarisasi bidang ketatausahaan.

B. Sasaran

1. Terciptanya pemimpin yang berkualitas dan berkompeten
2. Terciptanya pegawai yang berkualitas dan berkompeten
3. Terpenuhinya komposisi yang ideal antara jabatan dan SDM
4. Terselenggaranya aktivitas perkantoran
5. Terciptanya standarisasi bidang sarana dan prasarana
6. Terciptanya standarisasi bidang pengelolaan data dan informasi
7. Terciptanya standarisasi bidang ketatausahaan.



BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Kebijakan

1. Kebijakan pusat diarahkan pada upaya untuk pemenuhan tenaga yang berkualitas dan berkompeten
2. Peningkatan kemampuan para peneliti maupun non peneliti melalui kegiatan-kegiatan pengembangan seperti diklat, *workshop*, dll.

3. Membuat sistem *reward* dan *punishment*
4. Membuat kriteria penilaian balar ke dalam 3 kelas :
 - Kelas A : Kategori Sangat Bagus
 - Kelas B : Bagus
 - Kelas C : Kurang
5. Membuat standar minimal pengelolaan bidang sarana dan prasarana
6. Membuat standar minimal pengelolaan bidang data dan informasi
7. Membuat standar minimal pengelolaan bidang ketatausahaan.

B. Strategi

Strategi yang digunakan

1. Penempatan tenaga peneliti disesuaikan dengan keunikan situs-situs yang terdapat pada masing-masing wilayah kerja balar dengan tenaga keahlian penelitiannya. Contoh: Balar Papua lebih banyak ditempatkan peneliti-peneliti yang memiliki konsentrasi di bidang antropologi.
2. Penempatan tenaga teknis disesuaikan dengan bidang dan kemampuan. Contoh: Lulusan keuangan lebih tepat di tempatkan di bagian keuangan, bukan di bagian pengolah data arkeologi
3. Adanya standar minimal 2 kali harus mengikuti diklat, *workshop*, atau seminar, dan lain-lain yang wajib diikuti oleh masing-masing pegawai yang berkaitan dengan pengembangan diri dan kemampuan berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Contoh: Bagian teknisi dokumentasi wajib mengikuti diklat atau *workshop* mengenai teknik dasar penggunaan kamera
4. Pemberian penghargaan (*reward*) terhadap balar yang memiliki peningkatan prestasi dalam hal peningkatan kelas. Contoh: Balar Ambon pada saat penilaian pertama masuk dalam kategori kelas B, dan pada tahun berikutnya naik peringkat menjadi kelas A, maka Balar Ambon berhak mendapatkan jatah penambahan anggaran pada penganggaran tahun berikutnya. Dan



sebaliknya adanya pengurangan anggaran untuk balar-balar yang mengalami penurunan kelas dan balar-balar yang selama tiga tahun berturut-turut berada pada kelas yang paling bawah yaitu Kelas C

5. Penerapan standar minimal kriteria untuk posisi Kabalar dan Kasubag TU pada balar-balar
6. Pengkajian pengusulan kegiatan pada balar-balar untuk disesuaikan dengan kebijakan Pusat Arkeologi Nasional
7. Pengawasan dalam pengadaan sarana dan prasarana ditingkat Pusat dan Daerah.

C. Program dan Kegiatan

1. Penataan Kegiatan Balar-balar

- Sinkronisasi kegiatan balar-balar dengan kegiatan pusat pada saat pengajuan program kegiatan.
- Menyusun standar minimal kegiatan yang harus dijalankan oleh balar-balar
- Menyusun standar pedoman/norma/prosedur untuk diterapkan seluruh balar berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan operasional kantor, seperti: standar minimal sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang harus dimiliki setiap balar.

2. Peningkatan mutu dan produktivitas pegawai

- a. Standar minimal pelatihan, diklat, seminar, atau *wokshop* yang wajib diikuti oleh pegawai.
 - Pegawai yang menduduki atau diproyeksikan pada jabatan manajerial harus mengikuti program kepemimpinan dan pengetahuan teknis *job* spesifik di bidang kerjanya.
 - Pelatihan teknis untuk seluruh pegawai yang bekerja di bagian teknis, seperti: pemetaan, dokumentasi, dll.





- b. *Quality Control* terhadap hasil kerja
Penilaian prestasi kerja berdasarkan pencapaian sasaran pekerjaan
 - c. Lelang jabatan untuk posisi kepala Balai Arkeologi
Diadakan lelang jabatan untuk mengisi posisi Kepala Balar yang masa jabatannya sudah habis. Lelang jabatan dapat diikuti oleh seluruh pegawai pusat maupun daerah yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Perbaikan dan peningkatan kualitas kerja, sarana-prasarana pendukung dan pengelolaan di tingkat Pusat (Pusat Arkeologi Nasional) untuk dijadikan *pilot project* atau acuan yang menjadi standar bagi seluruh balar-balar.
 - Pengelolaan sarana prasarana
 - Pengelolaan data dan publikasi
 - Sistem administrasi dan keuangan.
 4. Mengadakan diskusi untuk pengajuan kegiatan
 5. Kegiatan penilaian balar-balar kedalam kelas-kelas yang sudah di tetapkan yaitu kelas A, Kelas B, Kelas C dengan dasar penilaian sebagai berikut:
 - Komposisi dan jumlah SDM;
 - Sarana Prasana;
 - Terbitan (akreditasi/ tidak);
 - Penyelenggaraan pameran dalam satu tahun anggaran;
 - Penyelenggaraan seminar (nasional /internasional);
 - Situs unggulan yang bisa dibawa ke level nasional;
 - Pengelolaan artefak;
 - Pengelolaan ketatausahaan; dll.

6. Penilaian dan masa jabatan Kabalar dan Kasubag TU

Kepala Balar :

- Adanya batas maksimal menjabat sebagai kabalar pada satu balar yang sama yaitu 2 periode (8 tahun);
- Adanya rotasi antar kabalar untuk tujuan penyegaran dan atau pengembangan;
- Kabalar dengan prestasi baik dapat dinominasikan sebagai Kapus;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balar:

- Batas maksimal sebagai Kasubag TU balar adalah 2 periode (8 tahun);
- Wajib melakukan kaderisasi;
- Pejabat Kasubag TU tidak boleh merangkap jabatan sebagai peneliti.



BAB III PENUTUP

Kita sekarang telah memiliki Konsep Kerja untuk memajukan arkeologi nasional. Ini sebuah modal dasar sebagai pedoman untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang selama ini menghambat kemajuan. Disebut konsep karena merupakan bangunan pemikiran dalam memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi. Mengingat masalah cenderung dinamis dan berkembang, maka bangunan pemikiran pun harus senantiasa dimutakhirkan untuk mengatasinya. Singkatnya konsep ini merupakan pedoman kerja yang terbuka pada penyempurnaan dalam upaya peningkatan kinerja. Keberadaan konsep ini setidaknya mencerminkan adanya gerakan pemikiran untuk keluar dari keterpurukan; wujud keinginan akan perubahan; dan kesadaran untuk menjawab tantangan. Dalam menyusun konsep ini kita didorong untuk memahami lebih jauh tentang rangkaian hambatan krusial yang selama ini menjadi momok kemajuan. Di sisi lain konsep ini juga mengingatkan kita akan potensi dan kekuatan besar yang kita miliki, kekuatan yang seyogyanya dapat menjadi agen perubahan jika semuanya terhimpun dalam sinergi kebersamaan.

Itu tataran konsep, namun harus kita pahami pula, bahwa konsep tidak akan membawa perubahan apapun jika tidak diimplementasikan dengan baik dan terencana. Siapa yang mengimplementasikan, jawabannya kita semua dengan motor penggerak Tim Peningkatan Kinerja Arkeologi (TPKA). Ke-delapan TPKA di Pusat siap menginisiasi diskusi-diskusi dalam membedah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, menemukan dan merumuskan solusi-solusi



25. Konsep tidak akan membawa perubahan apapun jika tidak diimplementasikan dengan baik dan terencana. Siapa yang mengimplementasikan, jawabannya kita semua dengan motor penggerak Tim Peningkatan Kinerja Arkeologi (TPKA).



26. Mari bekerja dengan hati, itulah pesan yang secara implisit disampaikan buku ini kepada kita semua. Pimpinan, peneliti, teknisi, dan staf lainnya harus bahu membahu dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visi kelembagaan.

pemecahan, memonitor dan mengarahkan implementasinya. Tentu lingkup kerja tim tidak sebatas Pusat, melainkan berlanjut ke Balai-balai Arkeologi. Dalam hal ini bersama TPKA Balai menjadi motor penggerak untuk peningkatan kinerja Balai Arkeologi. Dalam konteks ini TPKA Pusat dan TPKA Balai menjadi penggerak untuk meningkatkan interaksi dan interkoneksi Pusat dan Balai serta antar-Balai. Dengan demikian TPKA menciptakan mata rantai kerja di lingkup keluarga besar Pusat Arkeologi Nasional. Kemacetan di satu Balai akan ditangani bersama, sementara keberhasilan atau kelebihan di Pusat atau di Balai tertentu akan dibagikan ke Balai lainnya.

Itulah konsep dan kerangka kerja TPKA. Jika semuanya berjalan sesuai dengan konsep itu, kita sudah *"on tracks"* menuju perubahan. Namun lagi-lagi harus ditekankan keberadaan konsep dan motor penggerak bukan segalanya. Di atas semuanya, keberhasilannya tergantung pada kita semua—SDM keluarga besar Pusat Arkeologi Nasional. Konsep itu akan tetap konsep dan TPKA akan menjadi macan ompong jika tidak didukung oleh semua personel yang ada. Mari bekerja dengan hati, itulah pesan yang secara implisit disampaikan buku ini kepada kita semua. Pimpinan, peneliti, teknisi, dan staf lainnya harus bahu membahu dalam pelaksanaan misi dan pencapaian visi kelembagaan. Di sinilah perlunya kesadaran masing-masing untuk berbuat yang terbaik dengan cara berkontribusi untuk kemajuan. Jika kesadaran ini sudah kita miliki, maka kita telah membangun kekuatan yang dahsyat untuk bergerak maju. Dari titik ini kita akan melangkah ke titik-titik berikutnya menuju pencapaian idealisme—lembaga yang mengemuka di lingkup nasional dan internasional didukung SDM yang mumpuni.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Notulensi Workshop

1. Notulensi Sesi Pembukaan (TPKA)

Penjelasan Umum TPKA

Narasumber : Prof. Ris. DR. Harry Truman Simanjuntak

Hari/Tanggal : Selasa, 4 November 2014

Materi yang disampaikan lihat Bab I buku ini

Bonny A. Tooy :

1. Apa TBKA harus sama persis seperti Pusarnas atau disesuaikan dengan lingkungan masing-masing?
2. Sudah ada korlit apa harus lebur dengan TBKA?

Gusti Made Sudarmika :

1. Jumlah TBKA harus 8 apa tidak?

Siswanto :

1. Minta maaf belum menanggapi surat dari pusat karena belum ada yang paham tentang TBKA, karena di nomenklatur yang 8 sudah ada dalam pokja-pokja seperti di Manado. Jadi fungsi balai arkeologi sudah habis, kalau kepala balai tidak bekerja juga pokja-pokja sudah bekerja.
2. Mengapresiasi niat baik Pak Truman.
3. Tim TBKA ada gambaran tidak harus masuk dalam struktur yang harus punya target capaian yang ditentukan oleh waktu: misal laboratorium harus selesai sekian tahun. Bagaimana tim tidak tumpang tindih dengan struktur diampu oleh 3 orang: kabalar, peneliti, dll. Jadi motornya tetap di kabalar, tapi korlit ada yang menjalankan. Ada SK kabalar yang internal supaya teman-teman tidak bingung karena dimasukkan dalam tim TBKA.

M. Irfan Mahmud :

1. TBKA sangat sulit dilakukan seperti rancangan induk, dilakukan di UPT. Prinsipnya apa yang ada di TBKA pusat ini sudah dijalankan oleh balar-balar dalam pokja. Intinya hanya mendayagunakan TBKA ini ke balar-balar. TBKA laboratorium, melakukan pembinaan ke balar tim arkeometrinya. Karena di balar susah mencari orang, jadi pusat saja yang ada TBKA sebagai rekomendasi EHPA. Kalau dibuat lagi hal baru orang-orang balar jadi bingung.

2. Rumah peradaban dari rumah budaya sifatnya program suportif atau memberikan bantuan di balar-balar ini?

Muhammad Husni :

1. TBKA bagus, tetapi banyak teman-teman menuntut grade uraian tugas masing-masing tugas di TBKA dipertajam.

Baskoro Daru Tjahjono :

1. TBKA, muncul dari permasalahan yang ada di puslit yang internal sehingga muncul 8 TBKA, di balar tidak harus 8. Masalahnya SDM yang dipunyai pusat dan balar berbeda belum merata, ini sangat penting. Bisa dimasukkan TBKA SDM. Karena dalam 5 tahun ke depan ada moratorium PNS, bagaimana mengantisipasinya apa tetap dengan yang khusus atau tetap atau ada terobosan dengan perguruan tinggi untuk memenuhi SDM yang sangat kurang.
2. Pengembangan SDM belum terarah. Biasanya inisiatif sendiri untuk melanjutkan kuliah apa ada terobosan dari Kapus untuk dapat beasiswa, sebagai instansi peneliti harus mengembangkan SDM.

Nurhadi Rangkuti :

1. 2 tahun ini tidak menggunakan pokja karena sudah ada yang fokus dengan bidangnya masing-masing, jadi ada permasalahan juga, yang paling terlihat: pusat dan balar sebagai instansi penelitian hanya dilihat jurnalnya saja. Yang mana yang perlu dibenahi, karena kalau 10 balar sudah terakreditasi itu prestasi untuk puslit.
2. Kalau 1 lembaga penelitian jurnalnya tidak dianggap bagaimana yang lainnya, karena SDM yang sedikit
3. Benahi jurnal dan harus saling membantu untuk peneliti yang sudah terancam bisa, kalau bisa jangan lagi ada peneliti yang putus, apalagi jurnalnya tidak terakreditasi. Yang terlihat dari lembaga penelitian adalah jurnalnya.

I Gusti Made Suarbhawa :

1. Pokja-pokja antar balar belum ada koordinasi dan belum optimal. TBKA diharapkan dapat menghidupkan pokja-pokja pada tiap balar. Lembaga penelitian tidak bisa diukur hanya dari jurnalnya, tapi juga sinergi antara penelitian dan dampaknya ke masyarakat. Banyak parameter yang mempengaruhi suksesnya sebuah lembaga penelitian.

Bambang Sakti Wiku Atmojo :

1. Di Balar Banjarmasin punya pokja-pokja yang mirip dengan TBKA hanya beda nama namun hampir sama secara fungsi dan tugas. Bagaimana mensinkronkan antara proker TBKA dan proker pokja-pokja? Dari ke-8 TBKA ini pembinaan SDM belum muncul, apakah ada dan ada di struktur yang mana?

Desril Riva Shanti :

1. Awalnya saya masih bingung saat menerima surat mengenai TBKA, karena tidak jauh berbeda dengan pokja. Penguatan kapasitas jangan hanya UPT-nya, namun juga perlu SDM-nya, seperti teknisinya mungkin dapat diberi bimbingan teknis.

Harry Truman S. :

1. TBKA tidak mungkin menangani semua tugas-tugas. Fungsi yang melekat pada unit-unit kerja banyak yang kewalahan dan jarang mendapat perhatian (dari pusat?). Ketika TBKA banyak melakukan diskusi di UPT-UPT maka akan dengan sendirinya terbangun wacana-wacana baru mengenai pengelolaan UPT. TBKA dapat diprioritaskan pada aspek-aspek yang sifatnya mendesak, misalnya laboratorium atau perpustakaan.
2. TBKA yang ada di balar ini menjembatani antara pusat dengan UPT perihal koordinasi. Untuk saat ini kita berpikir cukup membentuk 1 TPKA di masing-masing Balas, tugasnya sebagai jangkar antara pusat dengan UPT.
3. Sebaiknya pokja diganti menjadi TBKA, supaya ada keseragaman antara balas dan pusat. Jika pokja sudah diganti TBKA maka koordinasi pusat dengan UPT dapat dipertajam.
4. Ada balas yang punya banyak pokja sudah layak untuk membentuk TBKA. Untuk balas yang belum, dari pokja yang sudah ada dapat diubah menjadi TBKA, dan dikoordinasikan dengan pusat. Perlu didaftar pokja-pokja di tiap balas dan dikoordinasikan tentang kesiapannya.
5. Untuk *grade*(LIPI) tidak perlu ke TBKA, tapi masalah kepegawaian untuk mengurusnya.
6. TBKA di UPT tidak hanya koordinasi dengan pusat, tapi dapat koordinasi antar TBKA di UPT, sebagai media *sharing*.
7. Untuk Pak Irfan, masalah rumah peradaban ini butuh sinergi antara instansi terkait, seperti Dirjen PCBM dan pemerintah daerah. Dari keterbatasan yang ada sebaiknya kinerja dioptimalkan. Dari semua data yang ada dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

I Made Geria :

1. Belum ada sinkronisasi antara pusat dan balas. Dengan adanya TBKA ini dapat menjadi salah satu alat yang dapat mensinergikan antara balas-balas dan balas-pusat. Perlu dirutinkan diskusi antara balas dan pusat dengan media pembinaan.
2. Mengenai rumah peradaban, ini bukanlah sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai kontribusi pusarnas dan balas dalam mengelola hasil penelitian, tidak hanya meneliti lalu ditinggalkan.

Harry Truman S. :

1. Tentang rancangan induk, meski dari pusarnas, namun juga perlu disosialisasikan dan didiskusikan dengan UPT-UPT, sebagai media untuk memperoleh masukan dan media untuk lebih mengintensifkan koordinasi antara balas dan pusat.
2. Ketidakjelasan informasi dari pusat jangan diacuhkan, namun direspon dengan pertanyaan, untuk lebih meningkatkan komunikasi antara UPT dan pusat.

Bonny A. Tooy :

1. Perlu diputuskan apakah pokja dihilangkan dan diganti dengan TBKA, untuk mensinkronkan sistem antara balar dan pusat.

Harry Truman S. :

1. Merespon Pak Bonny. Perlu diseragamkan, karena akan membingungkan jika ada pokja di daerah dan TBKA di pusat.

Ketut Wiradnyana :

1. TBKA menurut saya lebih kepada tim penyelesaian masalah yang ada di balar. Seharusnya tim ini yang mensinkronkan kebijakan pusat dengan pokja-pokja di daerah.

Siswanto :

1. Tusi pokja itu membantu pimpinan. Pokja akan beda dengan TBKA, karena TBKA sifatnya lebih sebagai media komunikasi UPT dan pusat. Seandainya ada kordinasi TBKA pusat ke daerah maka akan lebih baik.

Harry Truman S. :

1. TBKA juga membantu pimpinan, tapi sifatnya lebih holistik dan saling terkait antara komponen TBKA. Perbedaan pokja dan TBKA hanya pada *network*-nya, karena pokja hanya internal balar, sedangkan TBKA lintas lembaga.

Siswanto :

1. Nomenklaturnya ada istilah arkenas, apakah tidak aneh jika balar punya TBKA, nanti dikira balar membina pusat.

Harry Truman S. :

1. Sebenarnya yang bagus adalah Tim Penggerak Arkeologi Nasional.

Bonny A. Tooy :

1. Harus disepakati namanya, agar tidak rancu. Misalnya Tim Peningkatan Kinerja Arkeologi (TPKA).

Harry Truman S. :

1. Arkenas sebenarnya tidak masalah, karena arkenas disini sifatnya arkeologi secara nasional, bukan lembaga.

Titi Surti Nastiti :

1. Mengingatkan bahwa ada 8 TBKA, mungkin ada balar yang sedikit SDM-nya. Bagaimana menyikapinya?

Harry Truman S. :

1. Nanti Pak Wahyu akan berkoordinasi dengan kabalar-kabalar untuk teknis menyikapi kekurangmampuan UPT perihal keterbatasan SDM.

2. Notulensi TPKA Rancangan Induk

Narasumber : Drs. Bambang Budi Utomo

Moderator : Drs. Siswanto, M.A

Revisi TBKA Rancangan Induk:

1. Pemutakhiran/perbaikan/evaluasi sesuai perkembangan (benang merah tema lama-terakhir), visi/misi kementerian, tema, model-model dan isu-isu baru, tidak melibatkan instansi luar Pusarnas/ Balar;
2. Substansi TPKA tidak hanya terbatas Pusarnas, tetapi juga masukan Balar-balar sebagai satu kesatuan utuh. Judul akan dirubah (memasukan Pusarnas dan Balar-balar);
3. EHPA sebagai mekanisme kontrol pelaksanaan buku induk;
4. Update dilakukan satu kali dalam lima tahun.

Presentasi dan Diskusi:

Buku RIPAN yang terbit tahun 2004 dalam prosesnya ada perkembangan (tematis lima, kronologis tujuh+2), namun ada beberapa yang belum dilaksanakan. Pertanyaan yang dilontarkan ke forum: apakah perlu di ditakhirkan, disosialisasikan?

Bambang Sulistyanto : Bila buku RIPAN digunakan juga oleh luar instansi Pusarnas+Balar maka perlu diperbarui/dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika dimutakhirkan sebaiknya jangan melibatkan instansi luar (hanya Pusarnas+Balar).

Naniek HKT : Benang merah tema lama dan terakhir, TPKA buku Induk perlu diperbaiki/revisi/evaluasi.

Gusti Made Sudarmika : Pemutakhiran perlu dengan tema, visi/misi yang disesuaikan.

Yusmaini Eriawati : Bagaimana Pusarnas menjadi 'panduan'?

Baskoro Daru Tjahjono : Buku Induk perlu dicetak/terbitkan ke masyarakat, kemudian dibagikan ke instansi terkait (setjend, pemda, perguruan tinggi dan lain sebagainya) agar terinspirasi.

Priyatno Hadi S. : Judul perlu dirubah dengan memasukan Balar, tidak terbatas Pusarnas saja.

Sonny Chr. Wibisono : Substansi dalam RIPAN sudah ada 'posisi tawar', misalnya Pariwisata.

M. Irfan Mahmud : Ada kekurangan dan kelebihan RIPAN dalam konteks waktu dan perubahan disusun dengan melibatkan

lembaga dan masyarakat. Energi RIPAN perlu sampai program nyata dalam bentuk arahan, bukan wacana saja.

E. Wahyu Saptomo : RIPAN masih kurang menyentuh proses kebudayaan, teknik dan eksplanasi masih sangat kurang.

Eka Asih Putrina Taim : Mengapa tidak konsisten dalam tematis dan kronologis? Ada kesan tidak tuntas mencapai tujuan penelitian.

Harry Truman S. : Setuju tidak melibatkan orang luar dan judul dirubah? Mengusulkan *up-date* satu kali dalam 5 tahun.

3. Notulensi TPKA Rumah Peradaban

Narasumber : Drs. Sonny Chr. Wibisono, M.A, DEA.

Moderator : Drs. Nurhadi Rangkuti, M. Si.

Catatan Moderator:

Ringkasan presentasi:

Rumah Peradaban mencakup:

- Sentra himpunan data arkeologi
- Pengembangan media arkeologi bagi masyarakat
- Forum dan media belum optimal dikembangkan
- Undang-undang yang menjadi acuan memberi peluang bagi institusi-institusi untuk berperan serta

Rumah Peradaban: Upaya untuk menghadirkan media arkeologi melalui intensifikasi dan diversifikasi media dalam arkeologi.

Sinopsis Rumah Peradaban penting untuk menjelaskan apa yang akan dikerjakan/dibuat.

Permasalahannya:

Rumahnya dimana?

Tugas berat arkeolog adalah memberi makna dan merevalidasi warisan budaya untuk bangsa yang “pelupa”.

DISKUSI :

Termin I

1. I Made Geria

- Rumah Peradaban tidak harus fisik semua, gagasan dan ide juga bisa masuk ke dalam “Rumah Peradaban”. Gagasan dan ide tersebut bisa dibawa oleh Kapusarna ke dalam rapat-rapat pimpinan pada saat mempresentasikan Pusarnas.
- Tugas kita mengisi kekosongan “*inspiratorial*” untuk masyarakat. Tugas Pusarnas melalui Rumah Peradaban tersebut.
- Rumah Peradaban ini perlu dipromosikan secara awal, dengan mengangkat hasil-hasil riset dan bermanfaat untuk masyarakat.

2. Siswanto

Rumah Peradaban beda dengan museum. Maunya kita, Rumah Peradaban ini ibarat “mesin cuci otak” bagi para “pengunjung” yang masuk ke Rumah Peradaban tersebut. Mereka masuk ke dalam Rumah Peradaban dengan pengetahuan yang kosong, di dalamnya mereka akan memperoleh sejumlah pengetahuan, sehingga mereka menyadari bahwa ternyata bangsa-bangsa kita di Indonesia tidak seperti yang mereka bayangkan. Terutama bagi generasi muda kita. Di dalamnya bisa ada interaksi dengan bendanya, ada buku-buku yang bisa mereka baca sepuas-puasnya, dan sebagainya.

3. Budianto Hakim

Penangkapan saya, Rumah Peradaban itu adalah mengelola data masa untuk pengetahuan masa kini. Usul: apakah tidak sebaiknya “*stakeholder*” di daerah untuk membuat “sebuah regulasi”, misalnya dengan membuat tempat-tempat informasi berupa “pojok arkeologi”, misalnya di Bandara-bandara dsb.

Jawab: (Sonny Chr. Wibisono)

1. Yang penting bagaimana kita mengimplementasikan. Setuju himbuan Ka Pusarnas, Bargaining terhadap *stakeholders* yang lain untuk ditawarkan ke Satker yang terkait atau yang lebih tinggi (Ess. I misalnya).
2. (untuk Siswanto) Setuju dengan pemikirannya. Yang paling penting adalah *action*. Yang sekarang diperlukan adalah apa yang dicalonkan/dipikirkan secara bersama di Balar Yoga untuk dijadikan Rumah Peradaban. Mis. Situs Liyangan, atau ada lainnya.
3. (untuk Budianto) Usulkan apa yang bisa diangkat sebagai Rumah Peradaban dari Balar Makassar, situs-situs yang ada di Sulawesi, Misalnya Gua-gua di Maros yang dari hasil penelitian terakhir dikatakan merupakan situs gua yang paling tua dibanding situs-situs gua di dunia, seperti Situs Gua di Spanyol. Coba dirumuskan dan dibuat konsepnya.

Termin II

1. Bambang Sulistyanto :

Mendukung tentang adanya TBKA Rumah Peradaban ini karena di dalam arkeologi itu dapat disamakan dengan Arkeologi Publik. Himbuan saya, kita memang pintar dalam membuat rencana atau membuat program, tapi implementasinya mana? selama ini belum terlihat. Jadi untuk RP ini harus mulai “bekerja”/ *action*-nya. Tapi tentu saja tidak terlepas dari dana.

Ini harus menjadi perhatian bagi pengambil keputusan untuk memprogramkan berikut pendanaannya, agar terlaksana.

2. Nanang Saptono :

Di Balar Bandung ada kegiatan yang diberi nama Kemah Arkeologi. Sifatnya hanya memberikan/melayani apa yang peserta/mereka minta atau ingin tahu tentang arkeologi. Bahkan ada kegiatan foto-foto. Jadi intinya pada kegiatan ini adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang arkeologi sesuai dengan apa yang mereka minta/inginkan. Misalnya yang sudah dilakukan di Lampung dan Ciamis.

3. Muhammad Chawari :

Rumah Peradaban dan Riset Unggulan, seperti apa hubungannya?

4. Eka Asih Putrina Taim :

Rumah Peradaban perlu tindakan nyata. Usulan ada dua dari Balar Kalimantan, 1. Situs Sangkulirang, yang sekarang masuk nominasi *World Heritage* oleh UNESCO. Pemda menyambut dan Balar pun dilibatkan. 2. Obyeknya, Tambang Batubara tertua di Kalimantan.

5. Fadhila Arifin Aziz :

Gagasan tentang Rumah Peradaban ini sudah ada sejak tahun 2007 dengan menunjuk Situs Gilimanuk. Sekarang ini ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing kerjasama dengan Balar dan Arkenas mengenai Pantai Utara Bali (prasejarah – kolonial).

6. Muhammad Husni :

Balar Ambon, usul Bandanaire dijadikan Rumah Peradaban.

7. Harry Truman S. :

Ada dua catatan untuk Rumah Peradaban:

I. Tataran Konseptual

Dimulai dari istilah tersebut: Rumah Peradaban

Rumah: tempat atau wadahnya

Peradaban: Isinya

Yang perlu dipikirkan secara idealisme adalah: bentuk “rumah”nya itu seperti apa?

- Berfungsi sebagai tempat dalam memasyarakatkan peradaban tersebut.
- Peradaban tersebut tidak pernah berhenti, masalah akan terus selalu ada dengan kata lain penelitian tidak akan pernah berhenti.
- Peradaban itu bagian dari masyarakat itu sendiri.

II. Tataran Operasional

Sebaiknya kita sudah bisa mulai atau berangkat, misalnya dari situs-situs yang kita miliki dengan skala prioritas.

Jawab:

Mohon Pak Sulis juga kerja jangan hanya menjadi penasehat di TPKA saja. Ajukan apa usulannya dan bagaimana mengoperasionalkannya.

No. 2, 4, 5, 6 berupa masukan dan usulan, mari kita buat konsep operasionalnya bersama. Virtual disini tidak harus berupa konsep khusus, tapi harus ada operasionalnya.

4. Notulensi TPKA Kebinekaan

Narasumber : DR. Bagyo Prasetyo

Moderator : M. Irfan Mahmud, M.Si

DISKUSI

I Made Geria : Hal ini merupakan pemahaman baru dalam penelitian kebinekaan. Apakah bisa di programkan tentang kebinekaan, bagaimana teknis dan penerapan metodenya, serta pelaporannya?

Bagyo Prasetyo : Penelitian kebinekaan bersifat politis, dalam rangka mendukung program pemerintah. Ini penelitian murni, datanya sama, hanya masalah pengemasan dan pengarahannya yang dihubungkan dengan konteks kebinekaan. Mengambil nilai kebinekaan dari sebuah fenomena arkeologi.

Priyatno Hadi S : Event tahunan yang diangkat dari tema kebinekaan, event ini akan mengangkat anggaran kita, dengan catatan konsep mesti kuat. Melibatkan ke-sepuluh balar secara bergiliran.

Bagyo Prasetyo : Saya setuju dengan Pak Gupik, karena *event-event* seperti ini terkait dengan program besar kita rumah peradaban. Dan event ini akan sangat bagus di mata kementerian yang baru.

Bonny A. Tooy : Festival bukan tupoksi kita. Saya sederhana saja, kegiatan kebinekaan ini cukup tiga saja, pameran, seminar, dan nulis buku kebinekaan.

Ketut Wiradnyana : Prosesnya pasti panjang. Kalau balar punya program yang berhubungan dengan aspek kebinekaan ini yang perlu di dukung. Karena tidak semua balar punya program tentang kebinekaan. Karena ini bisa memakan waktu dan biaya yang banyak.

Bagyo Prasetyo : Kita tidak meneliti sepenuhnya, jadi masing-masing balar bisa meneliti yang khas-khas saja, dan disesuaikan dengan karakter daerahnya.

Harry Truman S : Ini tidak merubah format penelitian. Cari objek yang menunjukkan keberagaman. Kajian skala makro. Studi kewilayahan, secara komparatif antar data. Penelitian tidak bersifat mikro yang terpaku pada satu lokalitas atau situs, tapi juga mengkaji hubungan antar situs/lokalitas, studi kompilasi koleksi, dll. Diharapkan Arkenas dapat memberikan sumbangan besar dalam persatuan bangsa. EHPA dibuat terbitan dengan tema kebinekaan.

Siswanto : Isu kebinekaan ini sebaiknya dikemas tidak hanya penelitian, tapi pameran, seminar, dll, agar menyentuh masyarakat.

Banyak perbedaan aturan keyakinan yang rawan potensi konflik, sehingga perlu diangkat tema-tema dengan isu toleransi, sebagai media pemerkuat persatuan dan rasa toleransi dalam keberagaman. Sebagai contoh toleransi antar umat Islam dan Hindu dalam konteks sejarah menara kudus.

Ketut Wiradnyana : Jabarkan masalah keberagaman di area kerja Balar Denpasar.

M. Irfan Mahmud : Tema awal adalah penelitian kebinekaan, namun setelah banyak masukan tentang pameran, seminar, dll apakah masih relevan memakai judul penelitian?

Titi Surti Nastiti : Menurut saya judul penelitian kebinekaan sudah tidak relevan. Dalam kegiatan ini jangan terpaku substansi, tapi teknis juga perlu diperhatikan.

Harry Truman S : Setuju dengan Bu Titi, hal ini perlu dibahas masalah teknisnya. Jangan terpaku pada penelitian saja, perlu diperluas ke aspek-aspek lain.

Nurhadi Rangkuti : Ini semacam revitalisasi, yaitu menggali makna lama untuk memberi makna baru kepada masyarakat. Dalam hal ini revitalisasi dalam intepretasi kebinekaan. Hal ini dapat menjadi salah satu konten dalam rumah peradaban.

M. Irfan Mahmud : Satu hal yang disampaikan Bu Titi tentang teknis. Mumpung ada balar-balar, bagaimana ini dioperasikan, agar ada pembeda dengan penelitian-penelitian yang lainnya.

Naniek HKT : Kebinekaan kan tidak hanya penelitian, apa kita harus berangkat dari kepakaran? Karena jika keluar dari jalur kepakaran akan sulit diakomodasi. Hasil dari penelitian dimanfaatkan dalam kegiatan lain yang bersifat kemasyarakatan (pemutaran film, pameran, dll). Perlu kegiatan yang menampilkan tidak hanya akibat, tetapi juga sebab dari sebuah fakta tentang kebinekaan. Dipetakan dulu, dari hulu ke hilir permasalahan dan kebutuhannya (isu global).

Bagyo Prasetyo : Teknis peneliti tentu lebih paham untuk mengemasnya. Jika masing-masing bidang punya isu kronologisnya nantinya akan lebih mudah saat dikompilasi.

Yusmaini Eriawati : Isu kebinekaan ini memiliki banyak parameter, seperti religi, substansi, logam, dll. Teknisnya mau dari isu-isu pertahun atau bagaimana?

Sonny Chr. Wibisono : Berbeda belum tentu beragam. Dapat ditentukan isu-isu yang perlu dibahas untuk dilakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan isu besar yaitu kebinekaan.

Bagyo Prasetyo : Hal ini masih perlu didiskusikan perihal teknisnya. Perlu tim kecil selaku perumus (TPKA pusat?)

M. Irfan Mahmud : Masih banyak PR yang harus dilakukan, sehingga perlu digodok lagi oleh TPKA pusat untuk teknis yang mudah dipahami, dan disosialisasikan ke balar-balar.

5. Notulensi TPKA Akreditasi Majalah

Narasumber: Naniek Harkantiningasih

Moderator: I Gusti Made Suarbhawa

Nanang Saptono : Untuk mengajukan jurnal akreditasi, tim pengelola kami sudah beberapa kali konsultasi ke LIPI. Banyak teman yang tulisannya masih belum diharapkan oleh KTI. Masalah penulisan, bila di jurnal internasional yang menulis banyak, tetapi kalau kita masih sendiri-sendiri. Ada baiknya kita menulis dalam satu tim penelitian. Jadi tidak hanya satu penulis saja.

Budi Wiyana : Banyak faktor yang membuat jurnal berkala lamban terbit. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman, kalau bisa ada pembinaan dari pusat dan LIPI. Kalau aturan-aturan itu sudah jelas kita tinggal menerapkan.

Syahrudin Mansyur : Proses akreditasi jurnal di Ambon, terus melakukan terkait proses akreditasi. Kendalanya yang paling mendasar masalah kesiapan dan kecukupan naskah. Stok naskah yang dimiliki oleh peneliti masih kurang. Tetapi dewan redaksi selalu memberikan *support*. Pernah ada pertemuan antar dewan redaksi, ada usulan tentang SOP pembuatan jurnal ini. Mungkin kita bisa membahas tentang SOP ini.

Naniek Harkantiningasih : Ini menjadi pemikiran bersama. Kami bisa mengupayakan untuk diklat, baik dari LIPI atau penerbit. Kalau penulisan ilmiah memang ditulis bersama, laporan-laporan hasil penelitian harus ditulis bersama. Kalau artikel tidak masalah sendiri. Peneliti madya ke utama sebaiknya menjadi tunggal. Bank naskah bisa diambil dari PIA, EHPA, Seminar, dll. Masalahnya ada di dewan redaksi, harus niat bekerja. Tentang regulasi, kami sudah membuat tapi belum kami presentasikan di sini, mungkin akan kita email nanti, agar kita semua tahu aturan-aturan tersebut. Akreditasi di balar harus melalui pusat, tidak bisa langsung ke LIPI. Kuncinya di mitra bestari.

Frاندus : Tentang index system, untuk hal itu dibagi dalam beberapa pembuatan. Untuk sistemnya belum ada perkembangan. Saya akan cari sistem indeks di Perpustakaan Nasional.

Ketut Wiradnyana : Di redaksi kita sering kekurangan naskah. Hasil EHPA di Medan, dalam 2 tahun penelitian, dia diwajibkan untuk menulis. Dalam tingkat peneliti utama, diwajibkan menulis tentang kebijakan, tetapi penilaian belum ada. *Index system* apakah ini berkaitan dengan naskah individu?

Siswanto : Berhubungan dengan masalah kekurangan naskah, karena dibatasi oleh penulisan artikel di EHPA. EHPA sebaiknya membahas tentang artikel naskah lengkap, dan juga diuji.

Truman Simanjuntak : Dengan keberadaan TBKA ini menyadarkan kita bahwa yang namanya akreditasi ini harus dipertahankan. Kita harus saling memotivasi. Bagaimana tulisan-tulisan tersebut agar cepat diterbitkan? Ketika TPKA pusat melihat ada kekurangan naskah di balai B, balai C bisa membantu, itulah gunanya *networking*. Jangan meneliti-meneliti terus tetapi tidak ada publikasi. Peneliti meneliti 2 atau 3 tahun setelah itu hasilnya harus diterbitkan.

Truman Simanjuntak : Mengangkat kemampuan penelitian kita melalui diklat-diklat atau training itu, jangan lupa pada tugas utama kita yaitu menulis ilmiah, jangan hanya tulisan populer saja, bagus kalau dua-duanya bisa jalan.

Naniek Harkantiningih : Menggarisbawahi Pak Truman tadi, jangan hanya penelitian saja tetapi menulis jangan lupa. Rumusan dari tim ini, diklat harus dibuat, training itu penting. Kami hanya bisa membuat konsep, tetapi pasti bisa dilakukan, karena kendala dana. Peneliti arkenas dan balai harus saling sinergi, dan ditekankan sudah ditulis di jurnal yang mana, jangan sampai ada terjadi duplikasi. Kalau bisa kita penelitian dan pengembangan juga. Untuk dewan redaksi, jangan kebanyakan mengumpul artikel. Untuk penulisan kebijakan, di dalam standar kompetensi itu ada, artikel kebijakan itu bisa seperti power point ini. Menulis kebijakan hanya untuk penunjang. Nanti kita akan membuat *resume* pada TPKA ini.

I Gusti Made Suarbhawa : Harus ada pembinaan dan keterlibatan dari semua balai. Proses akreditasi tidak mudah, banyak aturannya, masalah teknis, substansi, dan administrasi. Untuk jurnal dirujuk buku tentang akreditasi, dan LIPI tentang akreditasi, bisa lihat di webnya.

Resume Diskusi :

- Diklat penulisan, diklat *e-journal*
- Aturan 3 kali penelitian harus menyusun KTI, ada sanksi?
- Mengolah artikel hasil seminar untuk jurnal-jurnal/balai naskah
- 2016 semua pusat dan balai terakreditasi
- Memiliki jurnal tidak terakreditasi
- Membuat artikel populer, tetapi juga KTI
- Menjaga akreditasi.

6. Notulensi TPKA Laporan Penelitian

Narasumber: Titi Surti Nastiti

Moderator: Gusti Made Sudarmika

BPA *trademark* dari Pusat Arkeologi Nasional dari zaman dahulu

Isu :

- BPA bukan kumpulan artikel
- LPA kurang dalam pembahasan/analisis

Tujuan

- Meningkatkan kemampuan para peneliti
- Ilmiah populer

LPA :

- Perbaikan dari EMPA 2010
- Penyeragaman bentuk laporan

Program :

- Mengoreksi/menyempurnakan panduan EMPA
- Mengoreksi semua laporan di Pusat Arkeologi Nasional dan Balar-balar, tidak lengkap dikembalikan
- Sinergi dengan dewan redaksi
- *Workshop*/pembinaan kepada para peneliti, teknik penulisan LPA dan karangan ilmiah populer.

Siswanto : LPA adalah kewajiban ketua dan anggota tim, karena ada pergerakan insitusi

- Tanggung jawab kemana?
- Distribusi wajib 10 buah exemplar, antara lain perpustakaan 2 buah, keuangan, Puslit
- Isi: format hampir sama tetapi uraian analisis tidak ditulis bab analisis tapi langsung judul penelitian
- Ada rekomendasi; karena berhubungan dengan kasus hukum, kemana rekomendasi ditujukan, rekomendasi adalah kepekaan peneliti terhadap nasib suatu situs atau BCB.

- Sanksi dikenakan bila laporan dibuat lebih dari 3 bulan, bila 1 tahun lebih ketua tim tidak boleh ke lapangan
- *Reward* diberikan bagi yang selesai sebelum 3 bulan.

Pak Jatmiko :

- Dulu ada buku panduan
- Rekomendasi adalah output untuk instansi lain
- Sanksi kurang diterapkan, sehingga pada akhir tahun banyak sekali laporan-laporan yang belum selesai.
- Kualitas peneliti yang sangat rendah karena kurang membaca
- Laporan tidak hanya untuk internal tetapi juga di kalangan eksternal (Pemda).
- Tekanan : buku pedoman dan sanksi.

Pak Baskoro :

- Laporan Penelitian Arkeologi (LPA) ada 3:
 - Laporan sementara belum ada analisis
 - Laporan Penelitian Arkeologi: sudah ada analisis
 - BPA: tergantung seleksi Dewan Redaksi
- Usul BPA jangan terbit kecuali dalam bentuk buku (via *Publishing House*). BPA jadi buku hingga memiliki nilai tambah.

Titi Surti Nastiti :

- Isi dari BPA, tidak sama dengan sistematika LPA pembebekannya berbeda
- Rekomendasi: penting untuk ranah hukum/perlindungan suatu situs.
- *Reward* dan *punishment* penting untuk meningkatkan kinerja penulis
- Laporan sementara biasanya tidak memuaskan *stakeholder* lainnya, orang daerah tidak akan puas hanya dengan laporan sementara.
- Distribusi harus dilengkapi dengan *copyright*
- BPA dapat dijadikan acuan bagi masyarakat luas, maka BPA harus ada.

Nanik Harkantiningsih : BPA adalah hasil dari satu penelitian bukan berupa bunga rampai yang terdiri dari beberapa penelitian, sama saja dengan jurnal yang tidak terakreditasi dan nilainya hanya 2.

Untuk Pak Baskoro jika tidak mau terbitkan BPA ya terbitkan saja buku, tapi bukan berarti BPA dilebur lalu dijadikan buku.

BPA itu warisan orang jaman dulu kita juga susah membuat berita-berita penelitian arkeologi karena itu ciri khas dari Puslit dan Balar. Untuk Pak Siswanto mengenai masalah artikel yang sebenarnya bisa dibicarakan pada sesi akreditasi, tentang pengiriman artikel, jangan sampai ada yang sudah mengirim ke satu tempat dikirim lagi ke tempat yang lain. Untuk mem-*filter*-nya maka diusulkan tiap pengiriman artikel harus ada acc dari Kabalar masing-masing.

I Gusti Made Suarbhawa :

Bu Naniek BPA adalah ciri khas Puslit dan Balar, BPA di Balar Denpasar masih berjalan hanya masih diolah terlebih dulu, agar lebih baik dan lebih menyeluruh jangan sampai LPA hanya dirubah L nya saja menjadi B. Setelah layak baru naik ke dewan redaksi sehingga BPA itu sama dengan Jurnal yang tidak terakreditasi.

Titi Surti Nastiti :

Bila LPA hilang, maka buku RIPAN harus dirombak total. BPA dan buku adalah dua hal yang berbeda. Bila BPA itu untuk ke dalam sebuah instansi sedangkan buku bisa dijual keluar dan disebarakan kepada masyarakat sedangkan yang satunya gratis. BPA harus dipertahankan, bila dikembangkan untuk menjadi buku itu silahkan namun pasti ada perbedaan.

LPA bila sudah melalui dewan redaksi, secara bulat jadi BPA pun tidak masalah, karena masyarakat tidak akan melihat LPA tetapi mengutip dari BPA.

Pengiriman artikel yang pada beberapa tempat adalah masalah etika penulis, untuk mencegahnya harus ada kerjasama antar dewan redaksi.

Truman Simanjuntak :

- LPA harus ada titik. Karena LPA adalah bukti otentik orisinal dari sebuah penelitian. LPA yang ditulis sekarang akan sangat berharga dan dicari pada beberapa tahun atau puluhan tahun kemudian.
- LPA harus ada *soft copy* dan *hard copy*.
- TPKA-TPKA yang ada (Pusat dan Balar) sebaiknya ditelusuri ulang keberadaannya, terutama yang ada di Pusat. Banyak LPA –LPA yang ada dahulu hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak tidak terdapat lagi pembagian bidang-bidang dan tidak ada lagi yang mengurus.
- Harus dibedakan antara LPA dengan buku ataupun dengan artikel. Ini sering disalahartikan oleh para peneliti kita. Banyak sekali contoh seorang peneliti menerbitkan artikel hanya dengan meng-*copy-paste* dari bentuk laporan, dia lupa

kalau format dan materinya berbeda. Pada laporan penelitian semua hal didokumentasi, semua gejala didokumentasi termasuk hal-hal teknis pelaksanaan di lapangan. Karya Ilmiah atau artikel sudah merupakan ulasan atau bahasan, disitulah perbedaan nyata antara laporan dengan karya ilmiah, ada sintesa dan pembahasan yang mendalam dalam artikel. Oleh karena itu saya tidak setuju LPA diterbitkan sebagai buku, tetapi LPA bisa terbit sebagai sebuah BPA setelah lewat seleksi Dewan Redaksi.

- LPA sebaiknya dibundel dengan rapi karena bermanfaat untuk peneliti-peneliti lain
- *Outline* bisa fleksibel tetapi ada standar minimal yang harus dipenuhi
- LPA merupakan tanggung jawab ke kantor.

Gusti Made Sudarmika :

- Apakah sanksi dan *reward* diperlukan untuk memacu kinerja peneliti, sehingga diperlukan SK

Truman Simanjuntak :

- *Reward* itu tergantung dari kebijakan para pimpinan balar
- Diharapkan catatan lapangan dikumpulkan

Bambang Sulistyanto :

Setuju bila diberikan sanksi tapi tidak setuju diberikan *reward* karena itu sudah kewajiban peneliti.

Titi Surti Nastiti :

- Tiap pengumpulan laporan harus ada dalam bentuk *soft* dan *hard copy*
- Tiap dokumentasi memang seharusnya disertai dengan keterangan-keterangan.
- Bila LPA memang tidak bisa terbitkan dalam bentuk buku karena formatnya beda, selain itu nilainya pun hanya 2.

Rangkuman :

- LPA harus ada karena sebagai bukti otentik sebuah penelitian
- Keberadaan dan penyimpanan LPA harus lebih diperhatikan
- LPA disimpan dalam bentuk *soft* dan *hard copy* serta dilengkapi oleh *copyright*
- LPA tidak dapat terbit sebagai buku
- Rekomendasi diperlukan untuk kepentingan hukum
- Tidak semua LPA dapat terbit sebagai BPA, terlebih lagi dalam bentuk artikel.

7. Notulensi TPKA Laboratorium

Narasumber: Vita

Moderator: Desril Riva Shanti

Irfan Mahmud : Laboratorium standar untuk balar itu minimal dan idealnya seperti apa? Laboratorium merupakan instrument penting dalam penelitian. Apa yang bisa dilakukan oleh Pusat pada UPT terhadap data-data penting yang ada di Balar? Balar butuh informasi apa yang sudah bisa dilakukan oleh laboratorium Puslit? Dengan pembiayaan dari Puslit.

Vita : Laboratorium di Balar tidak harus memiliki alat-alat yang canggih, dapat memakai alat-alat minimal yang digunakan secara optimal. Seperti lup, caliper, dll. Di Puslit yang sudah jalan biologi dan palinologi. Setiap balar bisa mengembangkan laboratorium sesuai dengan kemampuan SDM nya. Alat di lab pusat sudah cukup maju, tapi terbatas pada SDM-nya.

Budianto Hakim : Saya pernah ditantang untuk menyiapkan laboratorium yang standar. Banyak tulang yang sangat rapuh, maka diperlukan paraloid untuk mengeraskan tulangnya. Roh lembaga penelitian ada di laboratorium.

Vita : Penanganan tulang rapuh sudah betul. Untukantisipasi bisa juga di *casting*.

Budianto Hakim : Kenapa tidak ada usaha untuk membesarkan laboratorium di lingkaran Pusarnas.

Vita : Tidak hanya Puslit yang bisa mengajukan untuk pembuatan laboratorium ideal.

Siswanto : Sebaiknya dibicarakan secara terstruktur, dari kondisi, bisa untuk apa, dan apa yang mau dikembangkan.

Yusmaini Eriawati : Kita butuh *action*-nya, bukan sekadar deskriptif. Laboratorium tidak melulu memiliki peralatan, tapi ruangan untuk menganalisis temuan seperti prasasti.

Truman Simanjuntak : Keberadaan laboratorium sangat penting bagi lembaga riset, karena analisis merupakan satu rangkaian penting dalam penelitian. Laboratorium itu ada ruang untuk bekerja dan alat yang mendukung pekerjaan kita. Pembuatan laboratorium yang sesuai dengan kondisi yang ada, disesuaikan dengan SDM di lembaga itu. Untuk Balar pembuatan laboratorium disesuaikan dengan kondisi dan karakter temuan di area kerjanya. Contohnya Balar Makassar, karena wilayah kerjanya banyak terdapat *rock art* , kenapa tidak membuat laboratorium *rock art*?

Untuk laboratorium yang dulu ada tapi sekarang tidak ada (c14 di Bandung) dapat dikaji kembali untuk dibuat kembali.

Kita punya situs ribuan, dengan banyak temuan, tapi setiap analisis (*dating*) kebanyakan keluar.

Kami punya program untuk merintis laboratorium thermoluminesen

Yusmaini Eriawati : Laboratorium kita banyak terbengkalai. Di laboratorium hanya ada Mbak Vita saja. Alat kita bagus-bagus, tapi kondisinya tidak layak.

Frandus : Posisi laboratorium secara struktur belum jelas. Untuk lab kita butuh duduk bersama tentang keperluannya.

Wahyu Saptomo : Berdasarkan buku biru laboratorium itu ada di Bidang Program dan Kerjasama, tapi itu tidak tepat. Sebelumnya di Bidang Data dan Informasi. Akhirnya ke Bagian Tata Usaha, tapi ini tidak jelas. Kalau sejarahnya memang di Bidang Datin.

Truman Simanjuntak : Dengan TPKA ini dapat membantu untuk menentukan posisi laboratorium.

Jatmiko : Menanggapi pertanyaan masalah standar laboratorium. Untuk Balar sebaiknya tidak hanya menyediakan caliper dan lup saja, tapi juga dilengkapi peralatan kimia, mikroskop, dll. Masalah *casting* tidak semua balar punya SDM-nya.

Desril Riva Shanti : Balar Bandung awalnya mau jadi laboratorium, tapi akhirnya jadi Balar. Sekarang laboratoriumnya tidak berjalan, dan geolognya dua orang sudah pensiun. Jika laboratorium tetap dijalankan tapi tidak ada yang pakai ya sama saja tidak optimal. Alat bensen juga punya, tapi tidak tahu ada dimana. Saya ingin mengembangkan laboratorium analisis arkeologi, seperti laboratorium artefak.

8. Notulen TBKA EHPA

Narasumber : Jatmiko

Moderator : Bambang Wiku Sakti Atmojo

Siswanto : EHPA tidak hanya tentang panitia saja, harus ada evaluasi. Tahun ke tahun harus ada peningkatan, harus dievaluasi. Saya ingin memberikan gambaran tentang EHPA dan seminar. Di Balar kami benar-benar melakukan evaluasi kegiatan penelitian tahun lalu, dan membuat rancangan tahun berikutnya, dan tahun berikutnya lagi. EHPA masih seperti seminar, bukan evaluasi. Seminar produknya berupa makalah. EHPAnya Pusat dipilih dari EHPA Balar, mana yang akan dipakai di EHPA Pusat. Tidak semua hasil penelitian Balar bisa masuk EHPA, harus disaring dulu.

Naniek Harkantiningasih : Kita juga harus membahas teknisnya. Yang harus diangkat di EHPA Pusat adalah EHPA Balar yang sudah di-filter. Materi substansinya kita juga harus berangkat dari EHPA-EHPA Balar.

Jatmiko : Seminar beda dengan EHPA. Seminar ada temanya, EHPA evaluasi. Ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Kalau kita bicara tentang metodologi, kita bisa mengundang narasumber untuk berbicara di EHPA.

Sonny Wibisono : *Output*-nya rumusan, harusnya bisa lebih dari itu. Misalnya dengan menerbitkan buku, jadi perlu ada tim-tim untuk membuat buku tersebut. Atau ada kegiatan-kegiatan lain di EHPA untuk membangkitkan gairah seperti poster-poster dan sebagainya.

Budianto Hakim : Bagaimana posisi *Steering Committee* dalam EHPA?

Jatmiko : Tugas *Steering committee* adalah merangkum dan menjembatani pusat ke daerah-daerah. Untuk pengawalan selanjutnya entah ada tim sendiri atau *Steering committee*. Keputusan tetap ada di Kepala Pusat.

Irfan Mahmud : Peneliti harus diberikan raport agar lebih maju lagi.

Truman Simanjuntak : Di LIPI tiap tahun penelitian dipresentasikan.

RUMUSAN EHPA

I. EHPA

1. Makna dan pengertian Evaluasi harus dipertegas:
 - Evaluasi tentang Penelitian
 - Evaluasi tentang Metode dan Teknis (EMPA)
 - Evaluasi tentang Kebijakan
 - Evaluasi tentang Tematik
2. Penyelenggaraan EHPA dalam 3 (tiga) tahun mendatang bersifat umum agar semua peneliti dapat mengikuti
3. Penyelenggaraan EHPA di Balar-balar merupakan *filter* untuk menjaring EHPA Nasional
4. Penyelenggaraan EHPA sebagai fungsi kontrol dalam mengaplikasikan buku RIPAN (7 tema plus 2)
5. Penyelenggaraan EHPA dengan konsep lain/berbeda untuk menghindari kejenuhan, misalnya melalui pembuatan poster-poster atau eksperimen dan untuk menarik minat para peneliti
6. *Output* EHPA bukan berupa rumusan, tapi semacam buku yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan KTI yang siap diterbitkan dalam jurnal terakreditasi
7. Ada penilaian (raport) dalam penyelenggaraan EHPA, untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kualitas peneliti.

II. EMPA

Disepakati akan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali mulai tahun 2016.

III. SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL

Disepakati akan diselenggarakan setiap 2 tahun sekali mulai tahun 2016.

9. Notulensi TPKA Standardisasi UPT

Narasumber : Drs. E. Wahyu Saptomo, M.Hum

Moderator : Syahrudin Mansyur, S.S

Siswanto : Istilah Standardisasi UPT mungkin lebih tepat menggunakan istilah optimalisasi kelembagaan internal, jadi bisa mencakup UPT dan Pusat. Intinya dari kegiatan ini adalah pada peningkatan kelembagaan.

Ditinjau kembali apakah membuat standardisasi merupakan bagian dari tupoksi kita

Kami mendukung dan apresiasi TPKA standardisasi, hal ini bagus untuk internal sebagai bahan evaluasi kita.

Reward punishment : setuju tetapi lebih ditekankan kepada optimalisasi

Sebagai masukan mungkin penilaian terhadap Balar Yogyakarta yang mendapatkan juara 3 tingkat bulan resort provinsi bisa dijadikan acuan juga dalam penilaian seperti: Penilaian Pers (sering muncul disurat kabar), Lingkungan kerja, Tagihan air, dll.

Budi Wiyana : Kriteria klasifikasi balar salah satunya mengenai SDM, kita akui SDM kita jauh dari standar yang kita inginkan terlebih lagi dengan adanya isu moratorium. Dalam hal ini puslit sebagai pusat juga harus bertanggung jawab mengenai masalah SDM ini.

Berkaitan dengan ada atau tidaknya penerimaan pegawai kita harus selalu menyusun dan mengajukan kebutuhan pegawai baru, dan kita harus membuat alasan yang kuat untuk diajukan ke biro kepegawaian bahwa Puslit dan Balar-balar masih membutuhkan pegawai.

Bambang Sulistyanto : Perencanaan memang harus ada, tetapi Struktural tidak bisa diprediksi berbeda dengan fungsional yang sudah jelas tingkatannya seperti madya, utama. Apakah benar eselon 3 dan 4 ditiadakan?

E. Wahyu Saptomo : Tidak bisa diprediksi seseorang posisinya dimana, tetapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan.

Pernah menjadi isu dan pembahasan kedepannya yang tetap dipertahankan adalah ketatausahaan, sedangkan eselon 3 dan 4 yang lain yang bersifat teknis ditiadakan, tetapi sampai sekarang belum jelas

Kita masih was-was mengenai moratorium, nanti akan ada pembahasan di tingkat eselon 2 mengenai kebutuhan jumlah pegawai. Kita harapkan Kepala Pusat yang akan bergerilya.

Kelemahan mengenai penanganan kepegawaian di pusat adalah minimnya pegawai yang menangani kepegawaian, dimana

dengan tenaga yang minim pusat harus menangani kepegawaian pusat dan seluruh balar-balar.

Untuk tahun ini Pusat Arkeologi Nasional hanya mendapatkan jatah 3 pegawai baru, dan ketiga pegawai tersebut akan ditempatkan di bagian kepegawaian.

Berkaitan dengan usulan pak Siswanto mengenai istilah standardisasi masih bisa dibicarakan.

Standardisasi ini juga akan sangat berkaitan dengan penganggaran karena menyangkut sarana dan prasarana juga kegiatan-kegiatan pengembangan SDM seperti diklat, seminar dll.

Kegiatan standardisasi ini sangat sejalan dengan reformasi birokrasi.

Harry Truman S. : Berkaitan dengan pembahasan mengenai kelas harus adanya *link* dengan struktur di atas lembaga kita seperti dengan biro kepegawaian atau dengan eselon 1 nya.

Perlu disosialisasikan dengan pihak terkait di Kementerian mengenai program yang kita buat.

Mengenai kekurangan tenaga apakah memungkinkan dilakukan melalui analisis jabatan, jika memang memungkinkan kita buat analisis jabatan yang bagus dengan dipertegas pada konsepnya.

Masukan TPKA Standardisasi UPT:

1. Perlu menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk menentukan kelas/peringkat
2. Perlu melibatkan instansi terkait (luar), yaitu eselon 1 atau biro kepegawaian, dalam melakukan pemeringkatan (sesuai dengan Permendikbud 33)
3. Perlu Analisis jabatan – peta jabatan -- dasar mengusulkan SDM
4. Masa jabatan -- sementara sesuai ASN.

Lampiran 2: Susunan TPKA

SUSUNAN TPKA Pusat

- Penanggung Jawab : Drs. I Made Geria, M.Si.
Kordinator : Prof. Ris. Dr. Truman Simanjuntak
Sekretaris : ~~Dwi Mauliyati, S.Sos.~~ *Reto Hadi*
Lia, Nupolo, Wina
1. TBKA Laporan Penelitian : Dr. Titi Surti Nastiti (Ketua)
Prof. Ris. Dr. Bambang Sulistyanto
Eka Asih Putrina Taim, M.Si. *Nani Harau*
 2. TBKA Akreditasi Majalah : Prof. Ris. Dra. Naniek Harkantiningih (Ketua)
Agustijanto Indradjaja, S.S.
Sukawati Susetyo, M.Hum.
 3. TBKA Laboratorium : Ir. Fadlan S. Intan (Ketua)
Dra. Vita
Prof. Ris. Dr. Bagyo Prasetyo
 4. TBKA Standardisasi UPT : E. Wahyu Saptomo, M.Hum. (Ketua)
~~Dra. Nanny Harnani~~ *Agus*
Frاندus, S.Sos.
 5. TBKA EHPA : Jatmiko, M.Hum. (Ketua)
Sarjiyanto, M.Hum.
Drs. Heddy Surachman
 6. TBKA Buku Induk : Drs. Bambang Budi Utomo (Ketua)
~~Drs. Sony Chr. Wibisono, DEA~~ *Antia*
Priyatno Hadi, M.Hum.
Fadhila Arifin Azis, M.Hum.

7. TBKA Penelitian Kebinekaan: Prof. Ris. Dr. Bagyo Prasetyo (Ketua)
Yusmaini Eriawati, M.Hum.
~~Retno Handini, M.Si.~~
Drs. Tubagus Najib
Ir. Fadlan S. Intan
8. TBKA Rumah Peradaban: Drs. Sony Chr. Wibisono DEA (Ketua)
E. Wahyu Saptomo, M.Hum.
Priyatno Hadi, M.Hum.
Yusmaini Eriawati, M.Hum.
~~Retno Handini, M.Si.~~

Kelompok Asistensi:

1. Danang Rudatin, S.S.
2. Adhi Agus Oktaviana, S.S.
3. Nugroho Adi Wicaksono, S.T.
4. Auliana Muharini, S.S.
5. Dwi Mauliyati, S.Sos.
6. Atika Windiarti, A.Md.
7. Dra. Libra Hari Inagurasi, M.Hum.
8. Dra. Rr. Tri Wurjani, M.Hum.
9. Drs. Nasrudin

Lampiran 3: Susunan TPKA Balai Arkeologi

DAFTAR TIM TPKA BALAR

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Bambang Sakti Wiku	Kabalar	Balai Arkeologi Banjarmasin
2	Normalina, S. Sos.	Kasubag TU	-//-
3	Sunarningsih, S.S.	Peneliti Senior	-//-
4	Drs. Nurhadi Rangkuti, M.Si.	Kabalar	Balai Arkeologi Palembang
5	Aryandini Novita, S.S.	Kasubag TU	-//-
6	Dra. Budi Wiyana	Korlit	-//-
7	Dra. Desril Riva Shanti	Kabalar	Balai Arkeologi Bandung
8	Sukirja	Kasubag TU	-//-
9	Drs. Nanang Saptono	Korlit	-//-
10	Drs. Siswanto	Kabalar	Balai Arkeologi Yogyakarta
11	Drs. Muhammad Chawari, M.Hum.	Kasubag TU	-//-
12	Dra. Novida Abbas, M.A.	Peneliti Senior	-//-
13	Drs. I Gusti Made Suarbhawa	Kabalar	Balai Arkeologi Denpasar
14	Dra. Ni Komang Yudari	Kasubag TU	-//-
15	Drs. Nyoman Sunarya	Korlit	-//-
16	Drs. Gede Made Sudarmika	Kabalar	Balai Arkeologi Makassar
17	Dian Purnama	Kasubag TU	-//-
18	Drs. Hasanuddin, M.Hum.	Peneliti Senior	-//-

No	Nama	Jabatan	Keterangan
19	Drs. Bonny A.Tooy, M.Si.	Kabalar	Balai Arkeologi Manado
20	Drs. Joko Siswanto	Kasubag TU	-//-
21	Dra. Ipak Fahriani	Korlit	-//-
22	Irna Saptaningrum, M.Hum.	Peneliti Senior	-//-
23	Sriwigati, S.S.	Peneliti Senior	-//-
24	Drs. Muhammad Husni, M.M.	Kabalar	Balai Arkeologi Ambon
25	Ratno Polman Siahaan, S.Sos.	Kasubag TU	-//-
26	Marlon N.R. Ririmasse , M.A	Korlit	-//-
27	Wuri Handoko, S.S.	Peneliti Senior	-//-
28	Syahrudin Mansyur, M.Hum	Peneliti Senior	-//-
29	M. Irfan Mahmud, M.Si.	Kabalar	Balai Arkeologi Jayapura
30	Drs. Rumbewas H.M.	Kasubag TU	-//-
31	Zubair Mas'ud, S.S.	Korlit	-//-
32	Drs. Baskoro Daru Tjahjono	Kabalar	Balai Arkeologi Medan
33	Dra. Suriatanti Supriyadi	Kasubag TU	-//-
34	Lucas Partanda Koestoro, DEA.	Korlit	-//-
35	Drs. Ketut Wiradnyana, M.Si.	Peneliti Senior	-//-
36	Dra. Nenggih Susilowati	Peneliti Senior	-//-

**Perpustakaan
Jenderal Keb**

930.1
TIM

